

FUNGSI DAKTILOSKOPI DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA
(Suatu Kajian Kriminalistik di Kepolisian Resor Cilacap)



SKRIPSI

Oleh :
AMIN SURATNO
E1A003249

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS HUKUM
PURWOKERTO
2011

LEMBAR PENGESAHAN ISI DAN FORMAT SKRIPSI
FUNGSI DAKTILOSKOPI DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA
(Suatu Kajian Kriminalistik di Kepolisian Resor Cilacap)

Disusun oleh :

AMIN SURATNO
E1A003249

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Jenderal Soedirman

Diterima dan Disahkan

Pada Tanggal :

Pembimbing I

Pembimbing II

Penguji

Hibnu Nugroho, S.H., M.H.
NIP.19640724 199002 1 001

Handri Wirastuti S., S.H., M.H.
NIP.19581019 198702 2 001

Ziad, S.H.
NIP. 19470727 198003 1 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jenderal Soedirman

Hj. Rochani Urip Salami, S.H., M.S.
NIP. 19520603 198003 2 001

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya,

Nama : Amin Suratno

NIM : E1A003249

Judul Penelitian : FUNGSI DAKTILOSKOPI DALAM PROSES
PENYIDIKAN PERKARA PIDANA (Suatu Kajian
Kriminalistik di Kepolisian Resor Cilacap)

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain maupun dibuatkan oleh orang lain.

Dan apabila ternyata terbukti saya melakukan pelanggaran sebagaimana tersebut di atas, maka saya bersedia dikenakan sanksi apapun dari fakultas.

Purwokerto, Agustus 2011

AMIN SURATNO

E1A003249

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“FUNGSI DAKTILOSKOPI DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA (Suatu Kajian Kriminalistik di Kepolisian Resor Cilacap)”**. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Berbagai kesulitan dan hambatan penulis hadapi dalam penyusunan skripsi ini. Namun berkat bimbingan, bantuan materiil dan moril serta pengarahan dari berbagai pihak, maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada :

1. Ibu Hj. Rochani Urip Salami, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
2. Bapak Hibnu Nugroho, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi I, yang telah memberikan bantuan, arahan, bimbingan dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi.
3. Ibu Handri Wirastuti Sawitri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi II, atas segala bantuan, arahan, dukungan dan masukan yang telah diberikan, selama penulisan skripsi ini.
4. Bapak Sanyoto, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Acara, atas semua bantuannya.

5. Ibu Aryuni Yuliantiningsih, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan bimbingan kepada penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
6. Seluruh Dosen, Staf Akademik dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
7. Mbah Uti, yang telah memberikan segala cinta dan kasih sayang, perhatian, doa dan pengorbanan yang besar sedari aku dalam buaian hingga sekarang.
You're the best grandma I ever had. There's no one could compare you.
8. Kedua orang tuaku, yang telah memberikan cinta dan kasih sayang, perhatian, doa dan pengorbanan yang besar sehingga aku tumbuh seperti ini dan aku tetap bangga memiliki orang tua seperti kalian dalam hidupku. *Thanks mom.*
9. Semua kawan-kawan di Fakultas Hukum Unsoed atas segala doa, dukungan, semangat dan bantuannya.
10. Seluruh pihak yang telah membantu, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini mengalami berbagai kesulitan dan hambatan sehingga masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Purwokerto, Agustus 2011

Amin Suratno
E1A003249

ABSTRAK

Sidik jari mempunyai arti yang sangat penting bagi penyidik untuk mengungkap siapa pelaku tindak pidana tersebut, maka para penyidik harus berusaha untuk menjaga jangan sampai barang bukti yang terdapat atau tertinggal ditempat kejadian perkara menjadi hilang dan rusak. Berkaitan dengan pengidentifikasian sidik jari oleh penyidik adalah merupakan suatu upaya untuk membantu mencari fakta-fakta yang selengkap-lengkapnyanya yang bermanfaat dalam salah satu pembuktian tindak pidana dan merujuk pada pemiliknya.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah fungsi daktiloskopi dalam proses penyidikan perkara pidana dan bagaimanakah pelaksanaan pengambilan sidik jari dalam penyidikan di Polres Cilacap.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi daktiloskopi dalam proses penyidikan perkara pidana dan untuk mengetahui pelaksanaan pengambilan sidik jari dalam penyidikan di Polres Cilacap.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat preskriptif, sedangkan metode analisis yang digunakan adalah normatif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah fungsi daktiloskopi dalam proses penyidikan sebagai petunjuk awal bagi penyidik untuk mengungkap suatu kasus dan sebagai barang bukti dalam persidangan untuk pelaku tindak pidana. Sedangkan mengenai pelaksanaan pengambilan sidik jari oleh tim penyidik telah sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) yang dikeluarkan oleh Markas Besar Polri, yaitu Petunjuk Teknis Polri di Bidang Identifikasi dengan Surat Perintah No. Pol: Sprint/17/III/Pusident tanggal 1 Maret 2000.

ABSTRACT

Fingerprints have an important meaning for investigator to reveal the real perpetrators behind the crime, so investigators must maintain fingerprints as important evidence at the crime scene so that they are not lost or even damaged. Related to the identification of fingerprints owned by investigators, it is an effort to help find useful facts as a whole as evidence in criminal cases and to appoint their owners.

The problem in this study is how dactyloscopy function in the process of investigating criminal acts and how fingerprints are extracted in investigations at Polres Cilacap.

This study aims to determine the function of dactyloscopy in the process of investigating criminal acts and fingerprint extraction in investigations at Polres Cilacap.

The research approach method uses normative juridical with prescriptive research specifications, while the analysis method uses qualitative normative methods.

The results of this research are the function of dactyloscopy in the investigation process as an initial clue for investigators in revealing criminal cases and as evidence in the court. The implementation of fingerprint's extraction by investigation team was in accordance with the Technical Instructions issued by the National Police Headquarters (Markas Besar Polri), namely the National Police Technical Instructions for Identification with Order Letter No. Pol: Sprint/17/III/Pusident dated March 1, 2000.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	 8
A. Pengertian, Tujuan, Fungsi dan Asas Hukum Acara Pidana	8
1. Pengertian Hukum Acara Pidana	8
2. Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Pidana	12
3. Asas-asas dalam Hukum Acara Pidana	13
B. Penyelidikan dan Penyidikan	24
1. Penyelidikan	24
a) Pengertian Penyelidikan	24
b) Pejabat Penyelidik	25

c) Wewenang dan Tugas Penyelidik	26
2. Penyidikan	30
a) Pengertian Penyidikan	30
b) Pejabat Penyidik	34
c) Tugas dan Wewenang Penyidik	39
3. Teknik dan Taktik Penyidikan	44
C. Daktiloskopi dan Sidik Jari	48
1. Pengertian Daktiloskopi	48
2. Fungsi Daktiloskopi	50
3. Macam-Macam Sidik Jari	52
4. Pihak yang Berwenang Melakukan Pengambilan Bekas Sidik Jari Bukti Kejahatan	55
5. Proses Pengambilan Bekas Sidik Jari dalam Penyidikan	58
BAB III. METODE PENELITIAN	67
A. Metode Pendekatan	67
B. Spesifikasi Penelitian	67
C. Lokasi Penelitian	67
D. Jenis dan Sumber Data	68
E. Metode Pengumpulan Data	68
F. Metode Penyajian Data	68
G. Metode Analisis Data	68
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A. Hasil Penelitian	69

1. Data Sekunder	70
2. Data Primer.....	93
B. Pembahasan.....	97
1. Fungsi Daktiloskopi dalam Proses Penyidikan Perkara	
Pidana	97
2. Pelaksanaan Pengambilan Sidik Jari dalam Proses	
Penyidikan	102
BAB V. PENUTUP	124
A. Simpulan	124
B. Saran.....	124

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu norma yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban perorangan atau masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, oleh karena itu dalam menjalankan kehidupan bernegara memerlukan adanya hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat. Sebagai alat untuk mengatur masyarakat diperlukan alat perlengkapan yang mempunyai wewenang agar supaya hukum berlaku di masyarakat. Hal inilah yang membedakan ciri norma hukum dibandingkan norma-norma yang lainnya.¹

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 telah menjabarkan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Dari keterangan tersebut dapat diartikan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahannya dengan tidak ada kecualinya.

Secara umum hukum dapat dibedakan menjadi hukum publik dan hukum privat. Hukum publik meliputi: Hukum Tata Negara, Hukum Pidana,

¹ Bambang Poernomo, 1988, *Orientasi Hukum Acara Pidana, Edisi Revisi*, Yogyakarta : Amarta Buku, hal. 9.

Hukum Administrasi Negara, dan lainnya, sedangkan hukum privat meliputi: hukum perdata, hukum dagang, hukum perdata internasional.

Hukum pidana sendiri dapat dibagi pula menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, hukum pidana materiil memuat aturan-aturan yang merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, syarat-syarat pidana dan ketentuan pidananya. Sedangkan hukum pidana formil atau dapat disebut juga Hukum Acara Pidana merupakan hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana melaksanakan hukum pidana materiil, diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bagi Penegak Hukum) menyebutkan bahwa :

“Hukum pidana formil adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur soal-soal sebagai berikut :

1. Cara bagaimana harus mengambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.
2. Cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apakah yang dilakukan.
3. Setelah ternyata bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidiki, dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu.
4. Cara menangkap, menahan, dan memeriksa orang itu.
5. Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, pemeriksaan, menggeledah badan, dan tempat-tempat lain, serta menyita barang-barang itu untuk membuktikan kesalahan tersangka.
6. Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana dan
7. Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan dan sebagainya, atau dengan singkat dapat

dikatakan Hukum Acara Pidana adalah hukum yang mengatur tentang tatacara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan”.²

Kepolisian di dalam proses penegakkan hukum adalah instansi terdepan yang berhadapan secara langsung dengan pelanggar hukum. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan :

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu tugas kepolisian adalah melakukan penyelidikan terhadap adanya suatu peristiwa pidana, di samping itu juga melakukan penyidikan dan pemeriksaan apabila tersangka telah berhasil diketemukan.”

Oleh karena itu, polisi perlu memiliki pengetahuan sebagai penyidik serta sarana yang memadai untuk melakukan penyidikan.

Berdasarkan tugas yang diembannya terlihat bahwa kepolisian mempunyai tugas ganda yaitu preventif untuk mencegah kejahatan dengan jalan menjaga keamanan serta ketertiban, sedangkan tugas represif adalah menanggulangi kejahatan, dimana sebagai usaha yang dilakukannya adalah melakukan penyidikan. Sebagai mana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi :

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Penyidikan sebagai mana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah :

² R. Soesilo, 1989, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*, Bogor : Politeia, hal. 3.

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna mengumpulkan tersangkanya”.

Tindakan pertama kali yang dilakukan oleh penyidik dalam mengungkap suatu kejahatan adalah menemukan barang bukti yang kemungkinan tertinggal pada tempat atau bagian-bagian terjadinya kejahatan. Barang bukti pertama yang dicari oleh penyidik adalah menemukan sidik jari pelaku kejahatan, hal ini termasuk ruang lingkup hukum acara pidana.

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah :

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
2. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik.
3. Pemeriksaan ditempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
5. Penahanan sementara.
6. Penggeledahan.
7. Pemeriksaan atau interogasi.
8. Berita Acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan ditempat).
9. Penyampingan perkara.
10. Penyitaan.
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.³

Kegiatan penyidikan merupakan kegiatan dalam rangka suatu perkara menjadi terang/jelas dan dalam usaha untuk menemukan pelaku tindak kejahatan. Kegiatan penyidikan yang pertama kali dilakukan oleh penyidik dalam mengungkap suatu kejahatan adalah menemukan barang bukti maupun bekas-bekas kejahatan yang tertinggal pada tempat kejadian perkara (TKP), termasuk mencari sidik jari yang tertinggal di TKP maupun yang ada di

³ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 121.

barang bukti, karena dimungkinkan pelaku meninggalkan sidik jari di TKP maupun di barang-barang yang ada diketemukan di TKP.

Berdasarkan keterangan yang telah diuraikan oleh Andi Hamzah di atas, maka dapat dijabarkan bahwa tugas penyidik adalah dimaksudkan sebagai persiapan kearah pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Para penyidik mempersiapkan alat-alat bukti yang sah, sehingga dapat dipergunakan untuk mengungkap siapa pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana.

Penyidik perlu dilengkapi pengetahuan serta keterampilan dalam mengungkap tersangka di tingkat penyidikan, salah satunya apabila di tempat kejadian perkara ditemukan sidik jari yang diduga ada kaitannya dengan terjadinya tindak pidana, sehingga dalam mengungkap tersangka juga tidak akan lepas dari Ilmu Daktiloskopi yang dapat memberikan keterangan yang benar dan akurat mengenai sidik jari. Ilmu Kriminalistik yang menekankan pada tindakan penyidikan di tempat kejadian perkara sering diketemukan sidik jari sebagai bukti mati yang mempunyai peran penting dalam mengungkap tersangka tindak pidana.

Sidik jari mempunyai arti yang sangat penting bagi penyidik untuk mengungkap siapa pelaku tindak pidana tersebut, maka para penyidik harus berusaha untuk menjaga jangan sampai barang bukti yang terdapat atau tertinggal ditempat kejadian perkara menjadi hilang dan rusak. Hasil pemeriksaan tentang sidik jari dilakukan oleh petugas Identifikasi Daktiloskopi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan

pengidentifikasian sidik jari oleh penyidik adalah merupakan suatu upaya untuk membantu mencari fakta-fakta yang selengkap-lengkapya yang bermanfaat dalam salah satu pembuktian tindak pidana dan merujuk pada pemiliknya.

Sidik jari menjadi cara paling teliti sebagai bagian dari identifikasi karena memiliki tiga ciri antara lain yaitu:

1. Sidik jari bersifat unik, kemungkinan adanya dua pola sidik jari yang identik pada anggota populasi dunia termasuk jari yang berbeda dari tangan seseorang dan bahkan jari yang sama dari orang kembar sangat kecil sekali.
2. Sidik jari bersifat tidak varian kecuali perubahan ukuran besarnya yang mengikuti pertumbuhan individu, rincian pola sidik jari tidak berubah sepanjang hidup seseorang.
3. Tipe pola umum memungkinkan sidik jari diklasifikasikan secara sistematis.

Pentingnya sidik jari dalam mengungkap suatu perkara pidana, tidak lepas dari Ilmu Daktiloskopi untuk kepentingan identifikasi sidik jari. Berdasarkan hasil uraian tersebut di atas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul **Fungsi Daktiloskopi dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana (Suatu Kajian Kriminalistik di Kepolisian Resor Cilacap).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah fungsi daktiloskopi dalam proses penyidikan perkara pidana di Polres Cilacap?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pengambilan sidik jari dalam penyidikan di Polres Cilacap?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui fungsi daktiloskopi dalam proses penyidikan perkara pidana di Polres Cilacap.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengambilan sidik jari dalam penyidikan di Polres Cilacap.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis
Memberi sumbangan pengetahuan bagi Hukum Acara Pidana tentang fungsi daktiloskopi dan pelaksanaan pengambilan sidik jari dalam pelaksanaan penyidikan suatu perkara pidana .
2. Kegunaan secara praktis
Memberi gambaran bagi masyarakat tentang fungsi daktiloskopi dan pelaksanaan pengambilan sidik jari dalam pelaksanaan penyidikan suatu perkara pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Tujuan, Fungsi dan Asas Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Masyarakat mengenal berbagai macam hukum yang mengatur perilaku warga masyarakat, salah satunya adalah Hukum Acara Pidana yang erat hubungannya dengan Hukum Pidana. Istilah Hukum Acara Pidana dalam Bahasa Belanda menggunakan istilah *Strafordering*, yang jika diterjemahkan menjadi tuntutan pidana. Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara-cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.

Menurut Simons, hukum pidana materiil atau hukum pidana itu berisi tentang petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapat dipidananya suatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana dan aturan tentang pemidanaan, mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formil (hukum acara pidana) mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana.⁴

⁴ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 4.

Berkaitan dengan pemahaman pengertian hukum acara pidana tersebut, Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi mengenai hukum acara pidana yaitu bahwa :

“Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana”.⁵

Dari pendapat tersebut di atas dapat dilihat bahwa ada hubungan yang erat antara hukum acara pidana dengan hukum pidana yang memberikan bukti bahwa dalam penegakan hukum materiil memang diperlukan adanya alat perlengkapan yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan agar hukum dapat berlaku dan dipatuhi, yaitu hukum acara pidana.

Mengenai Hukum Acara Pidana menurut Van Bemmelen yang dikutip oleh Andi Hamzah lebih tepat dan lengkap, karena merinci pula substansi Hukum Acara Pidana itu, bahkan permulaan dan akhirnya saja. Terjemahan bebas dari definisi Van Bemmelen adalah sebagai berikut. Ilmu Hukum Acara Pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya pelanggaran hukum pidana, yaitu sebagai berikut :

- a. Negara melalui alatnya menyidik kebenaran;
- b. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu;
- c. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pelaku dan kalau perlu menahannya;

⁵ Wirjono Prodjodikoro, 1985, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Cetakan Keduabelas, Bandung : Sumur Bandung, hal. 20.

- d. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijsmaterial*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guma dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut;
- e. Hakim memberikan keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib;
- f. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut;
- g. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib.⁶

R. Soesilo, dalam buku karangannya yang berjudul Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum), mengemukakan bahwa hukum pidana formal, dinamakan hukum acara pidana adalah :

“Kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur soal-soal sebagai berikut :

- a. Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana,
- b. Cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apakah yang telah dilakukan,
- b. Setelah ternyata, bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidik dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menangkap, menahan dan memeriksa orang itu,
- c. Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang-barang itu, untuk membuktikan kesalahan tersangka,
- d. Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dijatuhkan pidana, dan
- e. Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan dan sebagainya, atau dengan singkat dapat dikatakan : yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehingga

⁶ Andi Hamzah, *op. cit.* hal. 6.

memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan”.⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memang tak memberikan definisi tentang hukum acara pidana. Suryono Sutarto dalam bukunya yang berjudul *Sari Hukum Acara Pidana I* mengemukakan pengertian hukum acara pidana yang didefinisikan oleh para ahli hukum yang bertujuan untuk memahami pengertian hukum acara pidana secara lebih mendalam yaitu :

“J. de Bosch Kemper menjelaskan, hukum acara pidana adalah sejumlah asas-asas dan peraturan-peraturan Undang-Undang yang mengatur hak negara untuk menghukum bilamana Undang-Undang pidana dilanggar. Sedangkan menurut Simons, hukum acara pidana bertugas mengatur cara-cara negara dengan alat perlengkapannya mempergunakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.

Pengertian menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara pidana ialah suatu peraturan yang mengatur cara bagaimana hak badan pemerintah berhak menuntut jika terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana akan didapat suatu putusan pengadilan, cara bagaimana dan oleh siapa suatu putusan pengadilan yang menjatuhkan suatu hukuman dapat dilaksanakan. Sementara itu menurut Sudarto, hukum acara pidana ialah aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak atau orang lain yang terlibat didalamnya, apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana dilanggar”.⁸

Tujuan dan tugas Ilmu Hukum Acara Pidana pada dasarnya sama dengan tugas dan tujuan ilmu hukum pada umumnya yaitu mempelajari hukum untuk mewujudkan kedamaian yang meliputi ketertiban dan ketenangan dengan memberikan kepastian hukum dan keadilan hukum kepada masyarakat. Hukum acara pidana disebut juga

⁷ R. Soesilo, *op. cit.* hal. 2.

⁸ Suryono Sutarto, 1987, *Sari Hukum Acara Pidana I*, Semarang : Yayasan Cendekia Purna Dharma, hal. 5.

hukum pidana formal, hal ini untuk membedakannya dengan hukum pidana materiil. Hukum pidana formal mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alat penegak hukumnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.

2. Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Pidana

Tujuan Hukum Acara Pidana dapat dilihat dalam Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor : M.01.PW.07.03 Tahun 1982 yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman, yaitu :

“Untuk mencari dan mendapatkan, atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.

Umumnya para penulis menyebutkannya sebagai mencari dan menemukan kebenaran materiil, merupakan tujuan hukum acara pidana. Tetapi usaha hakim menemukan kebenaran materiil dibatasi oleh surat dakwaan jaksa. Hakim tidak dapat menuntut supaya jaksa mendakwa dengan dakwaan lain atau menambah perbuatan yang didakwakan.

Pada umumnya pengertian antara tujuan Hukum Acara Pidana dan tugas Hukum Acara Pidana dicampuradukkan, karena sulitnya menempatkan posisi kedamaian, kebenaran, dan keadilan dalam

hukum. Hukum yang mengatur tatanan beracara perkara pidana itu tujuannya diarahkan pada posisi untuk mencapai kedamaian. Adapun penyelenggaraan beracara perkara pidana oleh pelaksana dengan tugas mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran, dan selanjutnya mengajukan tuntutan hukum.

Menurut Mr. J. M. Van Bemmelen dalam bukunya *Leerboek van her Nederlandse Straf Frocesrecht*, menyimpulkan bahwa tiga fungsi pokok acara pidana adalah :

- a. Mencari dan menemukan kebenaran;
- b. Pemberian keputusan oleh hakim;
- c. Pelaksanaan keputusan.

Dan ketiga fungsi tersebut, yang paling penting karena menjadi tumpuan kedua fungsi berikutnya adalah "mencari kebenaran". Setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan bahan bukti itulah hakim akan sampai pada putusan (yang seharusnya adil dan tepat), yang kemudian dilaksanakan oleh jaksa.⁹

Tujuan Hukum Acara Pidana mencari kebenaran itu hanyalah tujuan antara. Tujuan akhir sebenarnya ialah mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

3. Asas-Asas Hukum Acara Pidana

Asas-asas hukum acara pidana tumbuh berkembang dari nilai-nilai hukum dan kesadaran hak asasi peradaban dalam kehidupan manusia. Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang telah diletakkan di dalam undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun

⁹ Andi Hamzah, *op. cit.* hal. 8-9.

2004 harus ditegakkan dalam dan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

a. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Asas ini telah telah dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menghendaki agar pelaksanaan penegakkan hukum Indonesia berpedoman kepada asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dalam penjelasan umum butir 3 huruf e Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan :

“Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.”

Pencantuman peradilan cepat (*contante justitie; speedy trial*) di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana cukup banyak yang diwujudkan dengan istilah “segera” itu. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang dianut di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebenarnya merupakan penjabaran Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut.

- ”1) Proses perkara pidana yang dilaksanakan dengan cepat artinya menghindarkan segala rintangan yang bersifat prosedural, agar tercapai efisiensi kerja mulai dari kegiatan penyidikan sampai dengan pelaksanaan putusan akhir dapat selesai dalam waktu yang relatif singkat.
- 2) Proses perkara pidana yang sederhana diartikan penyelenggaraan administrasi peradilan secara terpadu agar pemberkasan perkara dari masing-masing instansi

yang berwenang berjalan dalam satu kesatuan yang tidak memberikan peluang kerja yang tidak berbelit-belit (*circuit court*) dan dari dalam berkas tersebut terungkap pertimbangan serta kesimpulan penerapan hukum yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan.

- 3) Proses perkara pidana dengan biaya ringan diartikan menghindarkan sistem administrasi perkara dan mekanisme bekerjanya para petugas yang mengakibatkan beban biaya bagi yang berkepentingan atau masyarakat (*social cost*) yang tidak sebanding, karena biaya yang dikeluarkan lebih besar dan hasil yang diharapkan lebih kecil”.¹⁰

Mengenai hal ini Andi Hamzah dalam bukunya Hukum

Acara Pidana Indonesia berpendapat bahwa:

”Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan sebelum ada keputusan hakim) merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia. Begitu pula peradilan bebas, jujur, dan tidak memihak yang ditonjolkan dalam undang-undang tersebut”.¹¹

The United States Supreme Court menekankan bahwa peradilan cepat (*speedy trial*) sangat fundamental yang tujuannya ialah :

- “1) Memperbaiki kredibilitas pengadilan dengan jalan mempersiapkan saksi-saksi secepat mungkin untuk memberi keterangan;
- 2) Mengurangi kekhawatiran terdakwa dalam menghadapi pengadilan dan juga untuk menghindari penahanan preventif;
- 3) Untuk menghindari luasnya hal mengadili sendiri oleh umum (*pre trial publicly*) dan sikap-sikap pejabat yang serba menduga-duga yang akan mempengaruhi hak terdakwa untuk pengadilan yang fair;
- 4) Untuk menghindari penundaan yang akan memberi dampak pada kesanggupan terdakwa membela diri”.¹²

¹⁰ Bambang Purnomo, *op. cit.* hal. 66.

¹¹ Andi Hamzah, *op. cit.* hal. 10-11.

¹² R. Soesilo, *op. cit.* hal. 15.

b. Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*)

Asas praduga tak bersalah telah dirumuskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dijumpai dalam Penjelasan Umum Butir 3 Huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi :

“Bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan sidang pengadilan, wajib dianggap tidak Bersalah sebhun adanya putusan pengadilan yang menyatakan dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap”.

Mengenai dicantumkan nya asas ini dalam penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat disimpulkan bahwa pembuat undang-undang menempatkan asas praduga tak bersalah merupakan salah satu yang melandasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan penegakkan hukum. yang secara tegas. Pasal ini merupakan jaminan atau dasar hukum dari suatu asas yang dalam kepustakaan Hukum Acara Pidana dinamakan asas *presumption of innocence*, yaitu suatu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*). Jadi, berdasarkan asas ini seseorang tidak boleh untuk dinyatakan

bersalah dengan cara apapun juga sebelum pengadilan menjatuhkan suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang kesalahannya tersebut. Seseorang hanya boleh dituduh atau disangka telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum dan tuduhan serta persangkaan inilah yang harus dibuktikan dalam pemeriksaan di muka pengadilan.

c. Asas Oportunitas

Asas oportunitas merupakan asas yang menyatakan bahwa penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi demi kepentingan umum, seseorang yang melakukan delik tidak dituntut. Asas Oportunitas diatur dalam ketentuan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang dengan tegas menyatakan asas oportunitas itu dianut di Indonesia. Pasal tersebut berbunyi :

”Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum”.

A.Z. Abidin Farid memberikan rumusan tentang asas oportunitas yaitu :

“Asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum”.¹³

¹³ Andi Hamzah, *op. cit.* hal. 17.

d. Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum

Pemeriksaan sidang pengadilan harus dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali apabila ada peraturan yang menentukan lain berdasarkan alasan khusus karena sifat perkara atau keadaan orang yang diperiksa. Dasar pemikiran dalam persidangan terbuka yang dapat dihadiri oleh umum itu adalah untuk perlindungan hak asasi manusia yang harus diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat manusia, dan disamping itu untuk pengawasan oleh masyarakat sebagai *social control* selama berlangsungnya persidangan.

Pemeriksaan sidang pengadilan terbuka untuk umum diatur dalam Pasal 153 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu :

”Untuk keperluan pemeriksaan Hakim Ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak”.

Jadi, pada saat membuka persidangan hakim harus menyatakan terbuka untuk umum. Pelanggaran atas ketentuan ini mengakibatkan putusan pengadilan batal demi hukum, sebagaimana disebutkan selanjutnya dalam Pasal 153 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

“Tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum”.

Tentu terhadap ketentuan ini ada pengecualiannya, seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 153 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu yang menyangkut kesusilaan atau anak-anak, hal ini dapat dilakukan dengan sidang tertutup.

“Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menetapkan pemeriksaan perkara yang terdakwa anak-anak dilakukan dengan pintu tertutup. Sebab jika dilakukan terbuka untuk umum akan membawa akibat psikologis yang lebih parah kepada jiwa dan batin si anak”. (M. Yahya Harahap, 2001 : 56-57)¹⁴

Sebenarnya hakim dapat menetapkan, apakah suatu sidang dinyatakan seluruhnya atau sebagian tertutup untuk umum yang artinya persidangan dilakukan di belakang pintu tertutup. Pertimbangan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada hakim yang melakukan hal itu berdasarkan jabatannya atau atas permintaan penuntut umum dan terdakwa. Saksi pun dapat mengajukan permohonan agar sidang tertutup untuk umum dengan alasan demi nama baik keluarganya.

e. Asas Semua Orang Diperlakukan Sama di Depan Hukum

Asas ini merupakan asas yang umum dianut di negara-negara yang berdasarkan hukum. Asas ini secara tegas tercantum dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dan dalam Penjelasan Umum butir 3a. Pasal 5 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut yang berbunyi :

¹⁴ M. Yahya Harahap, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 56-57.

”Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.”

Hal ini berarti bahwa semua orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum.

f. **Asas Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum**

Kebebasan tersangka atau terdakwa mendapat bantuan hukum merupakan ketentuan universal di negara-negara demokrasi dan beradab. Oleh karena itu, hal ini diatur secara jelas dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tentang bantuan hukum tersebut, di mana tersangka atau terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas. Kebebasan itu antara lain sebagai berikut :

- ”1) Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan;
- 2) Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan;
- 3) Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan, pada setiap waktu;
- 4) Pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum, kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara;
- 5) Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum lama kepentingan pembelaan;
- 6) Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka atau terdakwa”.¹⁵

Jika terdapat bukti bahwa penasehat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka atau terdakwa maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan atau penyidikan,

¹⁵ Andi Hamzah, *op. cit.* hal. 23.

penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan memberi peringatan kepada penasehat hukum (Pasal 70 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Apabila masih disalahgunakan maka penasehat hukum diawasi oleh pejabat yang tersebut dalam Pasal 70 Ayat (2a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di atas. Apabila setelah diawasi tetap disalahgunakan maka hubungan tersebut disaksikan oleh pejabat dan apabila masih tetap saja disalahgunakan maka penasehat hukum tersebut dilarang, hal ini ditentukan dalam Pasal 70 Ayat (3) dan Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

“Pengertian dari penyalahgunaan hak itu dalam waktu yang akan datang dapat mempunyai arti yang sangat luas sampai pada menyalahgunakan hukum selaku penasehat hukum. Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada penasehat hukum boleh jadi disalahgunakan, yang pada akhirnya tindakan penasehat hukum akan menjurus kepada tindakan seperti para pelaksana penegak hukum ketika menjalankan kewenangan tugas sewenang-wenang seperti pada masa HIR”.¹⁶

g. Asas Akusatur (*Accusatoir*) dan Inkisitor (*Inquisitoir*)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada hakikatnya tidak merumuskan secara langsung yang mengharuskan pemeriksaan secara akusator atau inkisitor. Pelaksanaan cara pemeriksaan itu lebih cenderung kepada teknik investigasi kriminal, oleh karena itu harus selalu mengingat bahwa cara tindakan petugas (*modus procedendi*) tidak dapat dipisahkan dari

¹⁶ Bambang Purnomo, *op. cit.* hal. 134-135.

situasi kejahatan yang terjadi (*modus operandi*) yang satu sama lain saling bergantung.

”Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pelaksanaannya akan lebih bijaksana apabila melihat harkat martabat manusia dari dua dimensi, dan sikap pemeriksaan menganut cara yang dualistis”.¹⁷

Dalam sistem inkisitor, tersangka merupakan obyek utama dalam pemeriksaan. Asas inkisitor ini sesuai dengan pandangan bahwa pengakuan tersangka merupakan alat bukti terpenting. Dalam pemeriksaan, pemeriksa selalu berusaha mendapatkan pengakuan dari tersangka. Kadang-kadang untuk mencapai maksud tersebut, pemeriksa melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan. Tujuan pemeriksaan dalam sistem inkisitor adalah untuk memperoleh pengakuan dari tersangka.

Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pidana Indonesia memberikan pendapatnya sebagai berikut :

”Kebebasan memberi dan mendapatkan nasihat hukum menunjukkan bahwa dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah dianut asas akusator itu. Ini berarti perbedaan antara pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan sidang pengadilan pada dasarnya telah dihilangkan”.¹⁸

Kebebasan memberi dan mendapatkan penasehat hukum dituangkan dalam Pasal 54 dan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi :

¹⁷ Bambang Purnomo, *op. cit.* hal. 150.

¹⁸ Andi Hamzah, *op.cit.* hal. 24.

Pasal 54

”Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.

Pasal 55

”Untuk mendapatkan penasehat hukum tersebut dalam Pasal 54, seorang tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya”.

”Selanjutnya dalam sistem akusatur, tersangka dianggap sebagai suatu subjek, dimana tersangka memperoleh hak dan kesempatan untuk saling mengajukan argumentasi dengan pihak penyidik, yaitu kepolisian atau jaksa penuntut umum sedemikian rupa, sehingga masing-masing mempunyai hak yang sama nilainya. Dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberi pedoman pada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusatur dalam setiap tingkatan pemeriksaan”.¹⁹

h. Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan

Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung, artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi. Sidang pengadilan melakukan pemeriksaan secara langsung kepada terdakwa atau orang lain yang terlibat, dengan mengadakan pembicaraan lisan, berupa tanya jawab dengan majelis hakim. Pemeriksaan perkara pidana antara para pihak yang terlibat dalam persidangan harus dilakukan dengan berbicara satu sama lain secara lisan agar dapat diperoleh keterangan yang benar dan yang bersangkutan tanpa tekanan dari pihak manapun.

¹⁹ M. Yahya Harahap, *op. cit.* hal. 40.

B. Penyelidikan dan Penyidikan

1. Penyelidikan

a) Pengertian Penyelidikan

Penyelidikan merupakan pemeriksaan pada tahap setelah diterimanya laporan atau aduan bahwa telah terjadi suatu perbuatan pidana dan atau perbuatan pidana yang tertangkap tangan. Awal penyelidikan merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum penyidikan, karena penyidikan baru dapat dilaksanakan setelah berkas-berkas hasil penyelidikan diserahkan oleh penyidik kepada penyidik.

Definisi mengenai penyelidikan dijelaskan oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi :

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Berdasarkan pengertian penyelidikan di atas, maka dapat diketahui bahwa penyelidikan berkaitan dengan suatu peristiwa. Untuk mengetahui apakah suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai peristiwa pidana atau bukan diperlukan suatu tindakan yang dianggap dapat membuat terang peristiwa tersebut. Tindakan ini merupakan kewenangan penyidik oleh karena kewajiban dari penyidik itulah yang harus melakukannya.

b) Pejabat Penyelidik

Penyelidik menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Dari pengertian tersebut maka jelas bahwa setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang masih aktif baik Polisi yang memiliki pangkat paling rendah sampai Polisi yang memiliki pangkat tertinggi mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan.

Pengertian menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut merupakan penegasan atas maksud dari Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi :

“Penyelidik adalah pejabat Polisi Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”.

Sedangkan M. Yahya Harahap menyatakan secara tegas bahwa :

“Penyelidik adalah setiap pejabat Polri, jaksa atau pejabat lain tidak berwenang melakukan penyelidikan. Penyelidik merupakan monopoli bagi Polri”.²⁰

²⁰ M. Yahya Harahap, *op. cit.* hal. 101.

c) Wewenang dan Tugas Penyelidik

1) Wewenang Penyelidik

Penyelidik dalam menjalankan fungsinya berpedoman pada Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menunjukkan sejauh mana wewenang penyelidik dalam melakukan penyelidikan. Adapun bunyi Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut :”

- (1) Penyelidik sebagai dimaksud Pasal 4 :
 - a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 2. Mencari keterangan dan barang bukti;
 3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum bertanggung jawab.
 - b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
 1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.
- (2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat 1 huruf a dan huruf b kepada penyidik.”

Berdasarkan bunyi Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di atas dapat diketahui bahwa penyelidik berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan tentang adanya kejahatan atau pelanggaran yang sedang terjadi atau yang telah selesai.

Terdapat perbedaan antara laporan dan pengaduan menurut Martiman Prodjohamidjojo sebagai berikut :

“Laporan :

- 1) Pemberitahuan tersebut merupakan hak dan kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap orang kepada yang berwajib yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Hal yang dilaporkan merupakan tindakan pidana umum.

Pengaduan :

- 1) Pemberitahuan tersebut merupakan hak dan kewajiban oleh seseorang yang disampaikan kepada yang berwajib, dengan permintaan agar yang berwajib mengambil atau melakukan tindakan.
- 2) Hal yang disampaikan merupakan tindak pidana aduan”.²¹

2) Tugas Penyelidik

Apabila penyelidik telah mengetahui atau menerima suatu laporan atau pengaduan tentang suatu tindak pidana maka penyelidik segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan, seperti mencari keterangan sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Penyelidik juga dapat melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab apakah perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan.

Tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab, dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 Kitab

²¹ Martiman Prodjohamidjojo, 1989, *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Pradnya Paramita, hal. 10.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan aturan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindak kejahatan.
3. Tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan dan jawabannya.
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
5. Menghormati hak asasi manusia.

Pasal 102 sampai dengan Pasal 105 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga menegaskan tentang tugas penyelidik dalam melakukan penyelidikan. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 102

- “1. Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
2. Dalam hal tertangkap tangan tanpa perlu menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagai berikut dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b.
3. Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyelidik wajib membuat berita dan melaporkannya kepada penyidik secepatnya”.

Pasal 103

- “1. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
2. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan

ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.

3. Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebut sebagai catatan”.

Pasal 104

“Dalam pelaksanaan tugas penyelidikan, penyidik wajib menunjukkan tanda pengenal”.

Pasal 105

“Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidik dikoordinasikan, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a”.

Apabila telah terbukti bahwa suatu peristiwa benar-benar merupakan tindak pidana, maka penyidik dapat melaporkannya kepada penyidik sehingga penyidik dapat mulai melakukan penyidikan sehingga dapat membuat terang tindak pidana tersebut.

3) Tujuan Penyelidikan

Tujuan diadakannya penyelidikan adalah untuk mendapatkan keterangan yang akurat tentang peristiwa yang sedang atau telah terjadi dan untuk mengetahui apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Jika peristiwa tersebut merupakan tindak pidana maka penyidik dapat melaporkan kepada penyidik untuk melakukan tindakan selanjutnya yaitu penyidikan dan apabila peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka tidak akan ada tindakan selanjutnya.

2. Penyidikan

a) Pengertian Penyidikan

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Kejaksaan pada tahun 1961 (sekarang diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004) umum dipakai istilah “pengusutan” sebagai pedoman istilah Belanda “*opsporing*” dan istilah Inggris “*investigation*”. Tetapi dengan dikenalkannya istilah baru oleh kedua undang-undang itu, yaitu “penyidikan” dalam arti yang sama dengan yang disebut di atas, maka sejak itu hilanglah secara perlahan istilah “pengusutan” tersebut yang biasanya dipakai oleh para penerjemah HIR menjadi RIB untuk menyalin istilah Belanda dalam HIR, yaitu “*opsporing*” tersebut”.

Istilah dan pengertian penyidikan secara gramatikal dalam Kamus Bahasa Indonesia terbitan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008 dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana. Asal kata penyidikan adalah sidik yang berarti periksa, menyidik, menyelidik atau mengamati-amati.²²

²² Dendy Sugono dkk, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, hal. 1201.

Istilah penyidikan menurut Bahasa Indonesia memiliki kata dasar “sidik”. Pertama sidik berarti terang, jadi menyidik artinya membuat terang atau jelas. Kata sidik berarti juga bekas yang kita jumpai dalam sidik jari, bekas sidik jari atau telapak jari sehingga menyidik juga berarti mencari bekas, dalam hal ini berarti bekas-bekas kejahatan.

Bertolak dari kedua arti tersebut ”terang” dan “jelas”, maka menyidik berarti membuat terang kejahatan. Untuk itu kadang menggunakan kata mengusut atau menyidik. Orang Belanda menyebut *opsporen*, dalam Bahasa Inggris disebut *investigation*, arti lengkapnya adalah mengusut sehingga dapat diketahui peristiwa pidana apa yang telah terjadi dan siapakah orang yang berbuat.²³

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan pengertian tentang : penyidik, penyidikan, penyidik pembantu, penyelidik, penyelidikan. Sebelum diadakan penyidikan, terlebih dahulu diadakan penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik dimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa Polri sebagai penyelidik tunggal. Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memberikan definisi penyelidikan sebagai berikut :

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan mencari dan menemukan suatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

²³ R. Soesilo, 1980, *Taktik dan Penyidikan Perkara Kriminil*, Bogor : Politeia, hal. 17.

Penyelidikan dilakukan dengan maksud untuk mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup guna dapat dilakukan tindak lanjut berupa penyidikan. Dapat dikatakan untuk adanya tindakan penyidikan harus terlebih dahulu dilakukan penyelidikan.

Penekanan dalam tindakan penyelidikan diletakkan pada tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat tekanannya pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti agar tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Penyidikan itu dilakukan atau dimulai pada saat setelah penyidik tersebut mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.

Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan keterangan tentang kapan tindakan penyidikan tersebut dimulai, yaitu :

“Penyidikan yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan”.

Jadi setelah ada bukti permulaan yang cukup dan suatu tindakan dinilai merupakan tindak pidana barulah penyidikan dapat dilakukan. Secara yuridis teknis, pengertian dari *opsporing*

(pengusutan/penyidikan) yang sangat terkenal adalah definisi de Pinto seperti yang dikutip Andi Hamzah sebagai berikut :

“Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa terjadi suatu pelanggaran hukum”.²⁴

Dalam Bab I Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur tentang pengertian penyidikan yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1 butir 2

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Jadi, dapat dikatakan bahwa penyidikan bukan merupakan tindakan yang berdiri sendiri terlepas dari penuntutan, tetapi justru merupakan bantuan bagi penuntutan. Setiap penyidikan yang dilakukan adalah berdasarkan atas pelanggaran suatu undang-undang, untuk selanjutnya menuntut perkara itu ke pengadilan. Bahwa penuntutan itu akhirnya mungkin tidak jadi dilaksanakan karena kekurangan bukti-bukti, penarikan kembali pengaduan dalam suatu delik aduan serta penerapan hak oportunitas adalah merupakan suatu perkecualian. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa tidak ada penyidikan bila tidak ada maksud untuk penuntutan.

²⁴ Andi Hamzah, *op. cit.* hal. 120.

Penyidikan dalam reserse kriminal biasa dibedakan antara lain sebagai berikut :

- (1) Penyidikan dalam arti luas, yang meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan terus menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya.
- (2) Penyidikan dalam arti sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk operasi repressip dari reserse kriminil Polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.²⁵

b) Pejabat Penyidik

Sehubungan dengan proses penyidikan, ada pihak-pihak yang berhak melakukan penyidikan, dalam hal ini adalah pejabat penyidik. Dalam pasal 1 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah dijelaskan pengertian dari penyidik yang berbunyi sebagai berikut:

“Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Pengertian penyidik tersebut mengandung dua unsur, dimana telah tercantum dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi :

- 1) Penyidik adalah:
 - a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
 - b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- 2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

²⁵ R. Soesilo, *loc. cit.*

Oleh karena itu penyidik mempunyai peranan yang penting dalam melakukan penyidikan, hal ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Seorang penyidik melakukan penyidikan adalah untuk menemukan alat bukti dan barang bukti, guna kepentingan penyidikan dan untuk mengungkap atau menemukan tersangka kejahatan.

Pejabat penyidik yang mempunyai wewenang melakukan penyidikan terdiri dari dua badan, diantaranya adalah :

- (1). Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- (2). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pengertian penyidik selain dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga terdapat pada ketentuan Pasal 1 butir 10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan pengertian penyidik adalah :

“Pejabat Kepolisian Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Kemudian melihat pada butir 11 menyatakan :

“Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang mendasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing”.

Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mencantumkan mengenai instansi atau kepangkatan seorang pejabat penyidik adalah :

1). Pejabat Penyidik Polisi

Menurut ketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, salah satu instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan adalah pejabat polisi negara. Agar dapat diberi jabatan sebagai penyidik, pejabat yang bersangkutan harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 6 Ayat (2) tersebut, kedudukan dan kepangkatan penyidik akan diatur dalam peraturan pemerintah yang diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan Penuntut Umum dan Hakim Peradilan Umum. Adapun syarat kepangkatan pejabat penyidik kepolisian tersebut diatur dalam Pasal 2A Ayat (1), Pasal 2B, dan Pasal 2C Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi :

Pasal 2A

- “(1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan :
- a. berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;

- b. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi”.

Pasal 2B

“Dalam hal pada suatu satuan kerja tidak ada Inspektur Dua Polisi yang berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi lain sebagai penyidik”.

Pasal 2C

“Dalam hal pada suatu sektor kepolisian tidak ada penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1), Kepala Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Inspektur Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik”.

Memperhatikan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, syarat kepangkatan dan pengangkatan dari penyidik dapat diperinci sebagai berikut :

a). Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh harus memenuhi kepangkatan dan pengangkatan sebagai berikut:

1. Sekurang-kurangnya berpangkat Inspektur Dua Polisi;

2. Berpangkat Bintara di bawah Inspektur Dua Polisi apabila dalam Sektor Kepolisian tidak ada Pejabat Penyidik Yang berpangkat Inspektur Dua Polisi;
3. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

b). Pejabat Penyidik Pembantu

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik pembantu diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 3A Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menurut ketentuan pasal ini syarat kepangkatan yang dapat diangkat sebagai penyidik pembantu adalah :

1. Sekurang-kurangnya berpangkat Brigadir Dua Polisi;
2. Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kepolisian negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Penata Muda (golongan III/A);
3. Diangkat oleh Kepala Kepolisian RI, atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Khusus mengenai pengangkatan pegawai negeri sipil di lingkungan kepolisian untuk menjadi pejabat penyidik pembantu, pegawai negeri yang bersangkutan harus mempunyai keahlian atau kekhususan dalam bidang tertentu. Tanpa syarat tersebut, tidak ada alasan untuk

mengangkat mereka menjadi pejabat penyidik pembantu.

Satu hal yang pasti syarat kepangkatan pejabat penyidik pembantu lebih rendah dari pangkat pejabat penyidik.

2). Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Mereka diberi wewenang khusus oleh undang-undang, Penyidik Pegawai Negeri Sipil ini diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu pegawai negeri sipil yang fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasalnya. Jadi, disamping pejabat penyidik Polri, undang-undang khusus itu memberi wewenang kepada pejabat pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk melakukan penyidikan. Akan tetapi wewenang dari pejabat pegawai negeri sipil untuk melakukan penyidikan tersebut terbatas hanya sepanjang menyangkut tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus tersebut.

c) Tugas dan Wewenang Penyidik

(a). Tugas-Tugas Penyidik

Penyidik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang

diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian; menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Tugas-tugas penyidik pada dasarnya meliputi tugas-tugas yudisial yang di dalamnya juga meliputi tugas kepolisian *preventive* (mencegah), diantaranya :

1. Memelihara ketertiban dan menjaga kepentingan umum,
2. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat,
3. Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam,
4. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan,
5. Mengusahakan ketaatan negara dan masyarakat terhadap peraturan negara.²⁶

Tugas-tugas non yudisial bagi kepolisian ialah mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat

²⁶ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2000, *Himpunan Juklak dan Juknis tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta : Polri, hal. 7.

membahayakan masyarakat dan negara serta melaksanakan tugas-tugas yang lain yang kepada diberikan seorang penyidik berdasarkan suatu peraturan negara yang berlaku. Adapun tugas yustisial bagi kepolisian meliputi tugas kepolisian *revresive* (menekan) yaitu mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum acara pidana dan peraturan negara.

Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 mengatur tentang Tugas-Tugas Pokok Kepolisian Negara sebagai berikut :

Pasal 13

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Pasal 14

“(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum

masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

Oleh karena itu, sepanjang mengenai tugas-tugas seorang penyidik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang penyidik, pada dasarnya yang harus dijaga dalam mengembangkan tugasnya adalah menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara

sehingga dapat terciptanya suatu tertib hukum baik dan aman sesuai cita-cita bangsa dan negara.

(b). Wewenang Penyidik

Seorang penyidik, karena kewajibannya mempunyai wewenang dalam melakukan penyidikan sebagaimana tercantum dalam KUHAP Pasal 7 ayat (1) yaitu :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian,
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan,
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dengan pemeriksaan tersangka,
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
- i. Mengadakan penghentian penyidikan,
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kewenangan kepolisian dalam melaksanakan proses pemeriksaan perkara pidana dijabarkan dalam Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara pidana;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan bekas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi bantuan dan petunjuk penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu ada yang diberikan kewenangan secara khusus sebagaimana diatur dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, antara lain seperti penangkapan, penahanan, penggledahan dan penyitaan.

3. Teknik dan Taktik Penyidikan

Peranan penyidik sangat penting karena tugas penyidik adalah menemukan alat bukti dan mengungkap terjadinya suatu kejahatan dalam masyarakat. Penyidik dalam melaksanakan tugasnya mengungkap suatu kejahatan mempunyai teknik dan taktik tersendiri. Menurut R. Soesilo dan M. Karyadi dalam bukunya *Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan)*, menjelaskan tentang teknik dan taktik penyidikan sebagai berikut :

a) Teknik Penyidikan

Proses penyidikan memerlukan adanya teknik-teknik tertentu dalam menemukan atau mengungkap suatu kejahatan. Teknik penyidikan mengajarkan tentang menjawab pertanyaan dalam bidang pengusutan perkara kejahatan dimana termasuk dalam bidang ini adalah :

- 1) Pengetahuan hukum, Undang-undang dan Peraturan-peraturan.
- 2) Ilmu Kepolisian.
- 3) Ilmu Pembuktian.
- 4) Cara Pengusutan.
- 5) Pengetahuan tentang bekas-bekas psikis dan phisik.
- 6) Pengetahuan tentang alat-alat teknis pembantu menetapkan dan melihat barang-barang seperti fotografi, mikroskop, *tape recorder*, *lie detector* dan sebagainya.
- 7) Pengetahuan identifikasi, daktiloskopi dan sinyalemen.
- 8) Ilmu jiwa.
- 9) Pengetahuan bahasa.²⁷

Pengetahuan tentang teknik penyidikan ini dapat dicapai dengan pendidikan kepolisian seluas-luasnya. Setelah mengetahui teknik penyidikan ini, polisi harus mempunyai keterampilan untuk menggunakan kecakapan teknis ini dengan tepat, jitu dan disertai dengan akal yang cerdas.

b) Taktik Penyidikan

Taktik penyidikan pada hakekatnya adalah kepandaian untuk dapat menerapkan tekniknya dengan hasil yang baik. Disamping itu taktik penyidikan juga merupakan pengetahuan yang

²⁷ R. Soesilo dan M. Karjadi, 1989, *Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan)*, Cetakan Pertama, Bandung : PT Karya Nusantara, hal. 4.

mempelajari problema-problema taktis dalam bidang penyidikan perkara pidana. Yang termasuk dalam taktik penyidikan antara lain:

- 1) Tindakan pertama ditempat kejadian perkara.
- 2) Ilmu jiwa kriminal, khususnya yang dipergunakan dalam memeriksa atau mendengar keterangan saksi-saksi dan tersangka.
- 3) Menghubungi spion atau informan.
- 4) Taktik penangkapan, penggledahan badan, rumah dan tempat-tempat lain, konfrontasi dan menyamar.
- 5) Pembuntutan.
- 6) Modus operandi.
- 7) Mass media.
- 8) Baik buruknya memberi hadiah dalam mencari kejahatan.
- 9) Gunanya banyak membaca buku-buku cerita detektif.
- 10) Bahasa sandi para penjahat, tahayul, jimat, guna-guna, dan lain sebagainya.²⁸

Terdapat perbedaan antara teknik penyidikan dengan taktik penyidikan tapi sulit memberi batasan yang tegas antara taktik penyidikan dengan teknik penyidikan karena keduanya sulit dipisahkan.

Proses penyidikan untuk mengumpulkan dan menemukan alat-alat bukti diperlukan adanya dukungan teknis terhadap penyidikannya diantaranya adalah:

- 1) Identifikasi

Identifikasi sangat penting karena dapat memberikan dukungan teknis terhadap penyidikan. Identifikasi terhadap pelaku dapat dilakukan melalui seluruh atau salah satu cara:

²⁸ *Ibid.*, hal. 6.

- a. Tanda-tanda badaniah (*signalement*) seperti tinggi badan, warna kulit, kulit, rambut, hidung, bentuk muka, sikar dan seterusnya.
- b. Foto atau potret si pelaku.
- c. Jejak (sidik) jari (daktiloskopi) seperti tersebut di muka.
- d. Modus operandi atau cara kerja si pelaku. (Andi Hamzah, 1984 : 13)²⁹

2) Laboratorium Kriminal

Penyidikan yang menyangkut usaha pengungkapan tindak pidana mengungkap aspek teknologi, memerlukan peranan Laboratorium Kriminal yang melaksanakan pemeriksaan benda bukti mati (*physical evidence*) dengan menggunakan ilmu pengetahuan forensik, yang meliputi antara lain:

- a. Pemeriksaan kimia kehakiman.
- b. Pemeriksaan racun kehakiman.
- c. Pemeriksaan balistik dan metalurgi kehakiman.
- d. Pemeriksaan fisika kehakiman.
- e. Pemeriksaan kehakiman kedokteran.
- f. Pemeriksaan dokumen kehakiman.
- g. Pemeriksaan dengan fotografi kehakiman.

3) Dinas Psikologi

Peranan dinas psikologi dalam penyidikan tindak pidana adalah untuk mengadakan pemeriksaan secara

²⁹ Andi Hamzah, 1984, *Pengusutan Perkara Kriminil Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hal. 13.

psikologis, dalam rangka pendekatan kejiwaan oleh penyidik agar tersangka memberikan keterangan yang diperlukan secara benar.

“Hasil pemeriksaan psikologis diperlukan pula untuk melengkapi berkas perkara guna dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penuntutan dan pengadilan”.³⁰

C. Daktiloskopi dan Sidik jari

1. Pengertian Daktiloskopi

Dalam menangani suatu kasus tindak pidana diperlukan adanya suatu keterampilan serta keahlian penyidik yang dibantu dengan pengetahuan ilmiah. Dalam menangani kejahatan yang menggunakan modus operandi teknologis, maka hanya dapat diusut secara teknologis atau secara ilmiah. Sebelum membahas mengenai daktiloskopi maka perlu mengetahui ilmu kriminalistik terlebih dahulu, karena daktiloskopi merupakan salah satu ilmu bantu dari kriminalistik.

Pengertian-pengertian kriminalistik sebagai berikut :

- a) Menurut James W. Osterberg mengemukakan bahwa :
“Kriminalistik merupakan profesi dan disiplin ilmu yang bertujuan untuk mengenal, identifikasi, individualisasi dan evaluasi bukti-bukti fisik dengan jalan menerapkan ilmu-ilmu alam dalam masalah hukum dan ilmu”.
- b) Menurut Goenawan Goetomo bahwa kriminalistik adalah :
“Ilmu yang dapat dipakai untuk mencari, menghimpun, menyusun dan menilai bahan-bahan guna peradilan”.³¹

³⁰ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2000, *Himpunan Juklak dan Juknis tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta : Polri, hal. 23-24.

³¹ Andi Hamzah, *op. cit.* hal. 12.

- c) Menurut buku tangan, kriminalistik adalah :
“Pengetahuan dalam menyelidiki kejahatan yang menggunakan pengetahuan fisika seperti ilmu alam, ilmu kimia, ilmu hayat dan ilmu hitung”.
- d) Menurut W.M.W. Noach, kriminalistik adalah :
“Ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai alat untuk mengadakan pengejaran atau penyidikan kejahatan secara teknis dengan menggunakan ilmu-ilmu alam, kimia dan lain-lain seperti ilmu kedokteran kehakiman, ilmu alam kehakiman antara lain ilmu sidik jari dan ilmu kehakiman seperti ilmu tentang keracunan dan lain-lain”.³²

Kriminalistik merupakan ilmu penyidikan dan ilmu penyelidikan kejahatan melalui sarana teknik, sehingga hukum acara pidana memerlukan bantuan ilmu-ilmu bantu. Salah satu ilmu bantu kriminalistik yang baik dan efektif adalah daktiloskopi atau sidik jari.

Oleh karena itu dapat dikemukakan pengertian dari daktiloskopi adalah :

- a) Daktiloskopi, berasal dari bahasa Yunani *daktulos*, yang artinya jari dan *skopioo* yang artinya mengamati, jadi secara harfiah berarti mengamati sidik jari.³³
- b) Daktiloskopi (*Daktyloscopy*, *Daktylographi*) adalah ilmu yang mempelajari sidik jari untuk keperluan pengenalan kembali (*identifikasi*) orang.³⁴

Dalam pengertian yang lain dirumuskan bahwa :

Pengetahuan sidik jari adalah suatu lapangan yang mempelajari tentang jenis-jenis, bentuk gambar serta kepentingannya pemakaian gambar-gambar dan jari-jari tangan manusia.

³² R. Soesilo dan M. Karjadi, *op. cit.* hal. 1-2.

³³ Andi Hamzah, *op. cit.* hal. 21.

³⁴ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 1993, *Penuntun Daktiloskopi*, Jakarta : Pusat Identifikasi Polri, hal. 1.

2. Fungsi Daktiloskopi

Daktiloskopi atau yang lebih dikenal dengan sebutan ilmu sidik jari ini telah mampu mendesak metode identifikasi lainnya karena keunikan dan karakteristik fisik sidik jari yang berbeda pada tiap individunya, serta sangat praktis dan akurat.

Ilmu sidik jari didasarkan pada 3 (tiga) dalil atau aksioma yang nyata, yaitu :

- a) Setiap jari mempunyai ciri-ciri garis tersendiri ditinjau dari segi detailnya, dan tidak sama dengan yang lain.
- b) Ciri-ciri garis itu sudah membentuk sejak janin berumur kira-kira 120 hari di dalam kandungan ibu, dan tidak berubah selama hidup, sampai hancur (*decomposition*) setelah meninggal dunia.
- c) Seperangkat sidik jari dapat dirumuskan, sehingga dapat diadministrasikan (disimpan dan dicari kembali).³⁵

Berdasarkan dari dalil tentang sidik jari di atas maka daktiloskopi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Sebagai alat bantu di dalam mencari tersangka atau pelaku tindak pidana, sehingga dapat memecahkan atau menyelesaikan suatu perkara pidana atau pelanggaran.
- 2) Merupakan suatu alat bukti sah.

John Edgar Hoover mengemukakan dalam buku pegangan yang berjudul *The Science of Fingerprints Classification and Uses* dari Federal Bureau of Investigation (Biro Penyelidikan Federal) Amerika, sebagai berikut :

³⁵ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *op. cit.* hal. 3-4.

“Criminal identification by means of fingerprints is one of the most potent factors in obtaining the apprehension of fugitives who might otherwise escape arrest and continue their criminal activities indefinitely. This type of identification also makes possible an accurate determination of the number of previous arrests and convictions which, of course, results in the imposition of more equitable sentences by the judiciary, in as much as the individual who repeatedly violates the law finds it impossible to pose successfully as a first, or minor, offender. In addition, this system of identification enables the prosecutor to present his case in the light of the offender's previous record. (Identifikasi kriminal melalui sidik jari merupakan salah satu faktor yang paling ampuh dalam penangkapan buronan polisi yang dimungkinkan akan melarikan diri dari penangkapan dan melanjutkan aktivitas kriminal mereka tanpa batas. Identifikasi jenis ini juga memungkinkan adanya penetapan akurat jumlah penangkapan dan hukuman sebelumnya, yang tentu saja hasil dalam pemidanaan yang lebih adil oleh pengadilan, karena seseorang yang berulang kali melanggar hukum tidak mungkin berhasil sebagai pelaku pertama. Selain itu, sistem identifikasi memungkinkan jaksa untuk mengajukan kasusnya saat ini dengan bantuan data sebelumnya dari pelaku itu)”.³⁶

Penerapan dalam prakteknya, sidik jari dapat dipakai untuk :

- “1) Mencari dan mengenal penjahat pelarian, pelarian narapidana, orang asing yang telah diusir keluar negeri, mencari penjahat yang telah dikenal menurut laporan dan pengaduan saksi-saksi;
- 2) Pemberitahuan tentang orang-orang yang dilaporkan hilang kepada sanak-saudaranya;
- 3) Mencari penjahat yang belum dikenal, tetapi telah mendapat ciri-ciri dan tanda-tanda dari saksi”. (R. Soesilo, M. Karjadi, 1984 : 57)³⁷

Untuk dapat mempraktekkan daktiloskopi yang baik dan

berhasil maka syarat mutlakny adalah :

- a. Harus dapat membaca macamnya sidik jari itu.

³⁶ John Edgar Hoover, “The Science of Fingerprints Classification and Uses” dalam <http://www.dermatoglyphics.com/sof/>, 10 Agustus 2006.

³⁷ R. Soesilo dan M. Karjadi, *op. cit.* hal. 57.

- b. Harus dapat membedakan antara dua sidik jari, apakah sidik jari itu sama atau identik atau berbeda.
- c. Membuat sidik jari dengan ciri-cirinya dan merumuskannya.

3. Macam-macam Sidik Jari

Penyidikan merupakan kegiatan untuk mengumpulkan barang bukti guna membuat terang/jelas tindak pidana yang terjadi. Penemuan barang bukti yang paling baik dan efektif adalah berupa sidik jari, karena merupakan barang bukti yang pertama kali ditemukan oleh penyidik pada tempat kejadian. Dengan begitu dapat dirumuskan pengertian sidik jari sebagai berikut :

“Sidik jari adalah hasil reproduksi tapak-tapak jari, baik yang sengaja diambil atau dicapkan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah terpegang atau tersentuh dengan kulit telapak (*friction skin*) tangan atau kaki”.³⁸

Selain pengertian dari sidik jari, perlu dikemukakan juga definisi dari kulit telapak, karena keduanya saling berhubungan satu sama lain.

Oleh karena itu pengertian kulit telapak adalah sebagai berikut :

“Kulit telapak adalah kulit pada bagian telapak tangan mulai dari pangkal pergelangan sampai ke semua ujung jari, dan kulit pada bagian telapak kaki mulai dari tumit sampai kesemua ujung jari, dimana terdapat garis-garis menonjol keluar, satu sama lainnya dipisahkan dengan celah atau alur membentuk lukisan-lukisan tertentu”.³⁹

Kulit telapak tangan terdiri dari dua lapisan:

- a. Lapisan dermal (kulit jangat) sering juga dinamakan kulit yang sebenarnya karena lapisan inilah yang menentukan bentuk dari garis-garis yang terdapat pada permukaan kulit

³⁸ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *loc. cit.* hal. 1.

³⁹ *Ibid.*

telapak. Apabila lapisan dermal terbuka atau cacat, maka bekas luka atau cacat itu akan permanen sifatnya.

- b. Lapisan epidermal, adalah lapisan kulit luar dimana terdapat garis-garis halus menonjol keluar (yang selanjutnya disebut garis-garis papilair). Terhadap lukisan-lukisan yang dibentuk oleh garis-garis papilar itulah perhatian kita ditujukan, untuk menentukan bentuk pokok, perumusan dan pemeriksaan perbandingan sidik jari. Luka atau cacat yang terjadi pada lapisan epidermal hanya cacat sementara karena susunan garis-garisnya akan kembali sebagaimana susunannya semula yaitu mengikuti lapisan dermal setelah sembuh. Kegunaan yang sesungguhnya dari garis papilair adalah untuk memperkuat pegangan (*grip*) sehingga benda-benda yang dipegang tidak mudah tergelincir. Garis-garis papilair terdapat pada binatang sejenis kera dan burung, tetapi bentuk lukisannya tidak sama seperti yang dimiliki manusia.⁴⁰

Mengenai macamnya sidik jari dapat dibedakan menjadi tiga golongan besar yaitu :

- 1) *Arch* (busur), adalah bentuk pokok sidik jari yang semua garis-garisnya datang dari satu sisi lukisan, mengalir atau cenderung mengalir kesisi yang lain dari lukisan itu, dengan bergelombang naik ditengah-tengah, kecuali *Tented Arch* (tiang busur) yang akan diterangkan lebih lanjut. 50% dari seluruh sidik jari terdiri dari bentuk *Arch*.
- 2) *Loop* (sangkutan), adalah bentuk pokok sidik jari dimana satu garis atau lebih datang dari salah satu sisi lukisan, melengkung menyentuh suatu garis bayangan (*imaginary line*) yang ditarik antar delta dan *core* dan berhenti atau cenderung kembali ke sisi datangnya semula. 60-65% dari seluruh sidik jari terdiri dari bentuk *loop*.
- 3) *Whorl* (lingkaran), adalah bentuk pokok sidik jari yang mempunyai paling sedikit delta, dengan satu atau lebih garis melengkung atau melingkar dihadapkan kedua delta. 30-35% dari seluruh sidik jari terdiri dari bentuk *whorl*.⁴¹

Ketiga golongan besar sidik jari di atas kemudian dibagi lagi menjadi :

- a. *Arch* terdiri dari :

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 1-3.

⁴¹ *Ibid.*, hal. 3

- 1) Plain Arch;
- 2) Tented Arch.
- b. Loop terdiri dari :
 - 1) Ulnar Loop;
 - 2) Radial Loop.
- c. Whorl terdiri dari :
 - 1) Plain Whorl;
 - 2) Central Pocket Loop Whorl (suku tengah);
 - 3) Double Loop Whorl (sangkutan kembar);
 - 4) Accidental (lukisan istimewa).⁴²

Sidik jari dapat dikatakan sebagai alat bukti yang paling utama dalam mencari dan mengenal penjahat didasarkan dari dalil :

1. Tiada satupun sidik jari manusia yang sama di dunia ini secara mendetail;
2. Sidik jari tidak akan berubah sejak manusia dilahirkan sampai meninggal dunia.

Menurut buku Penuntun Daktiloskopi Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia ada 3 jenis sidik jari, yaitu :

- a. *Visible Impression*, yaitu sidik jari yang langsung dapat terlihat tanpa mempergunakan alat-alat tambahan, seperti sidik jari yang diambil dengan tinta, demikian pula sidik jari bekas darah, bekas cat yang masih basah dan sebagainya, yang sering tertinggal ditempat kejadian perkara (TKP);
- b. *Laten Impression*, yaitu sidik jari laten yang biasanya tidak dapat langsung terlihat, dan memerlukan beberapa cara pengembangan terlebih dahulu untuk membuatnya nampak jelas, seperti sidik jari yang selalu ada kemungkinannya untuk tertinggal ditempat kejadian perkara (TKP);
- c. *Plastic Impression*, yaitu sidik jari yang berbekas pada benda-benda yang lunak seperti sabun, gemuk, lilin, permen coklat dan sebagainya.⁴³

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*, hal. 4.

4. Pihak yang Berwenang Melakukan Pengambilan Bekas Sidik Jari Bukti Kejahatan

Daktiloskopi merupakan ilmu bantu dalam menemukan alat bukti, sudah ditemukan sejak berabad-abad lalu. Daktiloskopi atau yang lebih dikenal dengan ilmu sidik jari, telah digunakan secara resmi di Hindia Belanda (Indonesia) berdasarkan *Koninklijke Besluit* tanggal 16 Januari 1991 No. 27 (Ind. Stb. 1991 No. 234) sebagai *system Anthropometri*. Penyelenggaraannya diserahkan kepada Departemen Kehakiman (*Departement van Justitie*) dan baru terwujud tiga tahun kemudian dengan terbentuknya *Centraal Kantoor Dactyloscopy van de Departement van Justitie* (C.K.D), yaitu pada tanggal 12 November 1914. Tugas utama dari kantor daktiloskopi ini adalah mengumpulkan sidik jari orang-orang Indonesia, baik kriminal atau bukan dan memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah dan swasta.

Semakin berkembangnya zaman maka Departemen Kehakiman RI (C.K.D), telah mengalami pergantian nama yaitu menjadi Subdirektorat Daktiloskopi Direktorat Pidana Departemen Kehakiman. Dalam rangka pembangunan Kepolisian Republik Indonesia, pada awal kemerdekaan dengan Instruksi Sementara Kepala Jawatan Kepolisian Negara, tanpa nomor, tanggal 2 Januari 1952, terbentuklah Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Ranting Daktiloskopi masing-masing ditingkat pusat, propinsi dan kabupaten serta prosedur kerjanya. Pada

Dinas Reserse Kriminil (DKN) ada seksi daktiloskopi (dibuat dengan Surat Keputusan Kepala Bagian Dinas Reserse Kriminal DKN Nomor : 9/51 tanggal 13 Agustus 1951) yang bertindak sebagai Kantor Pusat Daktiloskopi dengan menggunakan file sidik jari Zaman Hindia Belanda sebagai file awal. Pada perkembangan selanjutnya semua kartu-kartu sidik jari yang berasal dari Kepolisian Daerah dihentikan pengirimannya ke Kantor Pusat Daktiloskopi Departemen Kehakiman dan pengolahan serta penyimpanannya diambil alih oleh Seksi Daktiloskopi Dinas Reserse Kriminil (DKN).

Seksi Daktiloskopi Dinas Reserse Kriminil (DKN) statusnya berubah menjadi Dinas Identifikasi Direktorat II Markas Besar Polisi Negara berdasarkan Peraturan Sementara Menteri Muda Kepolisian Nomor : 2/Prt/MMK/1959 tanggal 23 Oktober 1959, tetapi baru terlaksana tanggal 25 Agustus 1960 No. 381/I/1960. Dinas Identifikasi terdiri dari Seksi Umum, Seksi Daktiloskopi, Seksi Pemetretan dan Seksi Dokumentasi. Kemudian Dinas Identifikasi mengalami perubahan sebagai berikut :

- a. Tahun 1961, Dinas Registrasi dan Identifikasi Penyidikan Markas Besar Polisi Negara, berdasarkan Peraturan Sementara Menteri/Kepala Kepolisian Negara No. 7/Prt/MK/1961/ tanggal 12 Desember 1961.
- b. Tahun 1962, Lembaga Laboratorium dan Identifikasi MABAK berdasarkan Peraturan Menteri/KSAK No. 2/Prt/MMK/1962 tanggal 1 November 1961 (Laboratorium Kriminil dan Identifikasi digabung).
- c. Tahun 1964, Direktorat Identifikasi MABAK (terpisah dari Labkrim), berdasarkan Keputusan Menteri PANGAK No. 11/SK/MMK/1964 tanggal 14 Februari 1964.
- d. Tahun 1967, Lembaga Identifikasi MABAK.

- e. Tahun 1970, Pusat Identifikasi Koserse Polri, berdasarkan Surat Keputusan Menhankam/Pangab Nomor : Kep/A/385/VII/1970 tanggal 1 Agustus 1970 Jo. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. 113/SK/Kapolri/1970 tanggal 17 September 1970.
- f. Tahun 1976, Jawatan Identifikasi Polri, berdasarkan Keputusan Menhankam/Pangab No. Kep/15/IV/1976 tanggal 13 April 1976 (sebagai Balakpus yng menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan fungsi Identifikasi untuk tugas-tugas kepolisian, administrasi Polri, Dephankam/ABRI, serta instansi Pemerintah lainnya sesuai keputusan Pemerintah cq Dephankam).
- g. Tahun 1984, Subdirektorat Identifikasi Direktorat Reserse Polri, berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/09/X/1984 tanggal 30 Oktober 1984 (sebagai badan pelaksana tingkat Mabes Polri yang berada dibawah Ditserse Polri dan menyelenggarakan pembinaan serta pelaksanaan fungsi identifikasi)
- h. Tahun 1992, Pusat Identifikasi Polri, berdasarkan SK. Pangab No. Kep/11/X/1992 tentang penyempurnaan pokok-pokok organisasi dan prosedur Polri (Validasi Sub Direktorat Identifikasi) menjadi Pusat Identifikasi Kepolisian Republik Indonesia disingkat Pusident Polri, adalah badan pelaksana pusat pada tingkat Mabes Polri yang berkedudukan dibawah Kapolri.⁴⁴

Dalam perkembangannya sampai saat ini belum ada ketentuan perundang-undangan nasional yang mengatur mengenai daktiloskopi. Meskipun demikian penyelenggaraan daktiloskopi oleh Kepolisian Republik Indonesia telah dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kepolisian Republik Indonesia (sekarang digantikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memberikan kewenangan kepada Kepolisian Republik Indonesia (terutama kepada penyidik dan

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 167-168.

pembantu penyidik) untuk mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

Oleh karena itu, pihak yang berwenang melakukan pengambilan bekas sidik jari dilakukan oleh petugas identifikasi atau daktiloskopi Kepolisian Republik Indonesia, yang tertuang dalam berita acara atau surat keterangan, mempunyai kekuatan pembuktian dalam sidang pengadilan (surat keterangan ahli) sesuai ordonansi tanggal 30 September 1949 (Stbl. 1949 No. 275) yang penjelasannya tertera dalam Bb. No. 15325.

5. Proses Pengambilan Bekas Sidik Jari dalam Penyidikan

Menyidik suatu tindak pidana kejahatan tidaklah mudah, apabila kejahatan tersebut melalui modus operandi tertentu yang memerlukan penanganan khusus dan memerlukan suatu pemeriksaan keahlian. Dalam hal penyidikan kejahatan dengan barang bukti berupa sidik jari, maka untuk dapat menemukan tersangka dari pelaku kejahatan diperlukan pemeriksaan identitas melalui ilmu daktiloskopi terhadap barang bukti tersebut.

Proses pemeriksaan terhadap barang bukti, khususnya terhadap bekas-bekas kejahatan, dalam hal ini adalah jejak (sidik) jari, memerlukan dasar-dasar ilmiah yang memenuhi aspek teknis dan aspek hukum.

a. Dasar penentuan Latent Prints

Kebiasaan manusia memegang dengan tangan kanan dan sewaktu memegang sesuatu adalah mempergunakan kebiasaan :

- 1) Jempol;
- 2) Telunjuk;
- 3) Jari tengah;
- 4) Jari manis.

Bekas-bekas yang ditinggalkan pada umumnya tidak sendiri-sendiri, tetapi gabungan dari dua, tiga atau empat sidik jari.

Dalam hal ini harus diadakan penelitian antara lain:

- 1) Cara memegang benda;
 - 2) Posisi jari-jari sewaktu memegang benda;
 - 3) Besar kecilnya tekanan dan arah jari-jari.
- b. Hal-hal penting yang harus diperhatikan pada waktu mengirim sidik jari ke laboratorium.

“Pada waktu mengirim sidik jari bukti kejahatan ke laboratorium dengan aturan :

- 1) Jangan sampai bekasnya menjadi rusak;
- 2) Bila tidak perlu sekali jangan menambah sidik jari pada benda tadi;
- 3) Dokumen-dokumen boleh dimasukkan dalam sampul *cellophaan*;
- 4) Pecahan gelas atau kaca dapat dimasukkan dalam peti kecil”.⁴⁵

Sidik jari yang dibungkus dan dikirimkan ke laboratorium guna pemeriksaan, pada bungkusnya harus di lak dan diberi label dengan keterangan-keterangan secukupnya.

⁴⁵ M. Karjadi, 1981, *Tindakan dan Penyidikan Pertama di Tempat Kejadian Perkara*, Bogor : Politeia, hal. 92.

“Barang-barang yang licin dan diduga ada sidik jari seperti gelas, botol, pecahan kaca, meja, bola lampu listrik, pisau belati dan sebagainya dilarang untuk dipegang dengan tangan, hendaknya dipergunakan tali, tongkat dan lain-lain”.⁴⁶

c. Isi dari Daktiloskopi adalah sebagai berikut :

- 1) *Powder fingerprint instruments:*
 - a) *Automatik sprayer gun* (alat penyemprot);
 - b) *Spare powder tank* (tempat bubuk powder);
 - c) *Spare powder brush* (sikat powder);
 - d) *Squit for spray gun* (alat penyemprot);
 - e) *T.H. type sprayer* (alat penghambur);
 - f) *Fingerprtint powder sprayer* (alat penyemprot powder);
 - g) *Fingerprint powder brush* (sikat powder pipih);
 - h) *Fingerprint powder brush* (sikat powder bulat);
 - i) *Alumunium powder* (bubuk alumunium);
 - j) *Grey powder* (bubuk abu-abu);
 - k) *Black powder* (bubuk hitam);
 - l) *White powder* (bubuk putih);
 - m) *Lycopodium powder* (bubuk lycopodium);
 - n) *Gold powder* (bubuk emas);
 - o) *Fluorescent powder* (bubuk fluorescent warna kuning).
 - p) *Finger print lifter black* (pengangkat hitam)
 - q) *Finger print lifter white* (pengangkat putih)
 - r) *Finylon finger print lifter* (pengangkat tembus cahaya)
 - s) *Finger print lifter transparant*
 - t) *Finger print scotch tape* (pita scotch)
 - u) *Countiner for lifter* (tempat untuk lifter)
 - v) *Countiner for powder* (tempat untuk bubuk)
- 2) *Silver nitrate dan ninhydrin instruments:*
 - a) *Flat brush for silver nitrate and ninhydrin large* ;
 - b) *Flat brush for silver nitrate and ninhydrin small*;
 - c) *Bottle for silver nitrate solution* (botol pengurai);
 - d) *Reduction fluid bottle* (botol cairan penipis);
 - e) *Ninhydrin solution bottle* (botol pengurai);
 - f) *Silver nitrate*;
 - g) *Corrosive sublimate for reduction*, 25 gram (untuk penipis);
 - h) *Ninhydrin* 1 gram;
 - i) *Plate* (piring);
 - j) *Lighting ang drying lamp* (lampu penerang dan pengering).
- 3) *Iodine finger print instruments:*
 - a) *Iodine fume producer*;

⁴⁶ R. Soesilo dan M. Karjadi, *op. cit.* hal. 21.

- b) *Iodine crystal* 25 gram;
- c) *Iodine lifting film*;
- d) *Iodine paper*.
- 4) *Finger print stamping instruments*:
 - a) *Scissors* (gunting);
 - b) *Pincette* (jepitan atau pinset);
 - c) *Magnifying lens* (kaca pembesar atau lup);
 - d) *Instrumen for remains*;
 - e) *Post mortem finger print spoon* (sendok mayat);
 - f) *Finger print stamping set*;
 - g) *Flash light*;
 - h) *Vinyl cloth* (kain penghisap).
- 5) Lain-lain
 - a) Kapas penghisap;
 - b) Meteran atau penggaris;
 - c) *Wide magnetic duster* atau *brush* (alat pengangkat bubuk besi);
 - d) Skop kecil;
 - e) Kompas;
 - f) Obeng, tang, pisau;
 - g) Tali batasan (demarkasi);
 - h) Bendera merah kecil;
 - i) Blanko slip;
 - j) Sikat pembersih;
 - k) Sarung tangan karet;
 - l) Pensil atau spidol;
 - m) Plastik alas.⁴⁷

d. Cara mengerjakan sidik jari yang ditemukan

Adanya sidik jari yang menempel pada benda karena keringat dan adanya tekanan pada suatu benda dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1) Bekas yang mendalam (*indruk*).

Bekas yang mendalam terjadi karena tekanan yang dilakukan pada benda yang sifatnya lunak, dimana pada tempat yang terkena tekanan tidak dapat bertahan, sehingga terdesak

⁴⁷ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2000, *Petunjuk Teknis Polri di Bidang Identifikasi No. Pol: Sprint/17/III/2000/Pusident*, Jakarta : Pusat Identifikasi Polri, hal. 1-3.

kedalam. Ruang lekuknya berisi bentuk gambar garis-garis papilair dari jari yang ditekankan, garis-garis papilair pada ruang lekuk dalam nampak seperti punggung karang.

2) Bekas yang menempel (*afdruk*).

Sidik jari yang menempel pada benda dibedakan menjadi :

1) Sidik jari yang sudah nampak terang.

Sidik jari yang sudah nampak dengan nyata disebabkan karena perpindahan zat warna pada benda lain dengan perantara jari-jari. Zat-zat tadi dapat berupa jelaga, darah, cat dan lain-lain, akibat dari perpindahan warna atau zat warna, maka dapat dilihat gambar sidik jari dan dapat difoto dengan mudah.

2) Sidik jari yang belum nyata (*latent impression*).

Sidik jari yang kurang terang perlu dikembangkan dengan memakai *powder* atau bubuk tertentu bila bekas sidik jari terdapat pada gelas, baja, benda-benda keras walaupun telah lama tersimpan tapi masih dapat dikembangkan.

Ada beberapa cara mengembangkan sidik jari yang kurang terang diantaranya adalah :

1) Cara mekanis

Sidik jari ditaburi dengan bubuk berwarna yang kering dan halus sehingga rata. Warna bubuk bertentangan (kontras) dengan warna benda dimana sidik jari terdapat. Cara menaburkan bubuk adalah sebagai berikut :

- (a) Menyemprotkan perlahan-lahan dan sedikit demi sedikit bubuk diatas sidik jari latent sehingga diperoleh gambar yang paling terang;
- (b) Menyaring bubuk dengan saringan halus diatas sidik jari latent, sehingga gambar garis papilair timbul;
- (c) Dengan menggunakan kuas yang halus yaitu disapukan dengan hati-hati diatas sidik jari latent dan searah;
- (d) Bila terdapat sidik jari latent pada kertas yang permukaannya licin atau pada kaca, maka bubuk ditaruh pada pinggir kaca atau kertas atau kaca dimiringkan dan diketok-ketok agar bubuk melewati sidik jari latent sehingga garis-garis papilair terlihat.

2) Cara kimia

Sidik jari yang ditemukan dibenda yang terbuat dari kayu atau kertas kadang kala tidak dapat ditimbulkan dengan powder, oleh karena itu dipakai cara-cara kimia sebagai berikut:

(a) Pemakaian *yodium*

Upaya menimbulkan sidik jari latent dapat digunakan uap yodium, sedangkan alat untuk menguapkan kristal yodium banyak ragamnya asal dapat mengenai sidik jari latent. Dengan pemakaian uap yodium dalam waktu singkat garis papilairnya akan timbul dan berwarna coklat, gambar yang timbul tidak tahan lama sehingga harus diambil gambarnya.

(b) Pemakaian gas *iodine*

Pemakaian gas *iodine* untuk menimbulkan sidik jari latent dengan cara; *iodine* kristal ditaruh didalam lemari kaca yang tertutup, bila perlu untuk mempercepat proses pengisapnya maka dibagian bawahnya dipanasi. Bila uap sudah terlihat dilemari itu dan warnanya ungu maka dokumen yang akan diperiksa segera dimasukkan dalam lemari tersebut, maka akan terlihat bekas sidik jari dengan jelas. Warna yang melekat pada sidik jari tidak akan bertahan lama dan akan hilang dalam tempo 15-20 menit, maka harus segera dilakukan pemotretan.

(c) Pemakaian *iodine fumer*

Fumer yang berarti gambar diatas ditiupkan ketempat-tempat kertas yang diduga ada sidik jari latennya, bila ada bekas sidik jari maka akan kelihatan warna biru (ungu) yang dapat bertahan sampai beberapa hari.

(d) Pemakaian *osmic acid*

Cara menimbulkan sidik jari dengan menggunakan *osmic acid* adalah sebagai berikut :

Satu atau dua tetes dari 4% *osmic acid* ditaruh dipiring, kapas kering juga diletakkan dipiring dan ditempatkan pada sebuah lemari kaca yang tertutup. Kemudian dokumen ditempatkan dalam lemari kaca tersebut, maka

akan timbul sendiri dengan ukuran panas yang berada didalam dikamar tersebut. Hal yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai menghisap uap sebab terlalu tajam. Cara ini sangat lambat dan memakan waktu 1-2 jam tergantung pada umur sidik jari latent dan hal-hal lain yang mempengaruhi sidik jari tersebut. Garis-garis yang keluar warnanya seperti perak sifatnya juga tetap.

(e) Pemakaian perak nitrat

Dokumen-dokumen yang diduga ada sidik jari latent dimasukkan dalam *oplossing silver nitrate*, kemudian dokumen disinari dengan tajam dengan jalan dipanasi dengan lampu berkekuatan 100 watt atau dipanasi dengan sinar matahari, setelah itu akan terlihat bahwa kertas yang tidak terdapat sidik jari latent akan menjadi coklat muda sedangkan yang berisi sidik jari latent garis papilairnya menjadi berwarna sawo matang. Gambar sidik jari bila telah timbul harus segera diambil gambarnya atau dipotret dengan baik.

(f) Pemakaian *ninhydrin spray*

Khusus untuk bekas sidik jari yang sudah tersimpan lama digunakan *ninhydrin spray* (0,5% *ninhydrin* dilarutkan dalam *acetone*), kemudian larutan *ninhydrin* disemprotkan pada kertas tersebut lalu dipanaskan dalam tungku maka

bekas-bekas akan segera timbul yang kemudian harus segera dipotret.

e. Pengangkatan atau pemindahan sidik jari latent

Bekas-bekas sidik jari yang telah timbul belum tentu dapat dipotret karena kurang terang, untuk mengatasi hal ini maka pengangkatan diperlukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Sidik jari setelah diberi bubuk powder lalu diangkat dengan *tape* atau *folie* karet, *folie* ini terbuat dari bahan yang terbuat dari bahan yang bersifat adesif (tarik-menarik). Permukaan yang adesif diletakkan pada sidik jari latent yang sudah dibuat terang, sehingga bubuk yang terdapat pada gambar akan terhisap oleh permukaan yang adesif itu. Supaya sidik jari yang sudah terhisap pada *folie* ini tidak cepat rusak maka permukaan yang adesif diberi lapisan mika atau *celluloid* yang tipis.

f. Pemotretan

Kedudukan ilmu fotografi dalam lapangan sidik jari memegang peranan yang penting, sebab tidak mungkin suatu hasil yang baik dalam lapangan sidik jari terlepas dari masalah pemotretan. Maka dari itu ilmu daktiloskopi erat hubungannya dengan ilmu fotografi atau ilmu potret kehakiman, yang akan diuraikan hanya masalah teknis dalam hubungannya dengan pemotretan sidik jari latent yang sudah ditimbulkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bagian ini akan diuraikan metodologi penelitian yang digunakan dan mendasari penelitian. Hal-hal yang akan diuraikan disini meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data, dan analisis data.

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis.

Konsep ini memandang hukum itu identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Selain itu konsepsi tersebut melihat hukum dari suatu sistem normatif yang bersifat otonom, terlepas dari kehidupan masyarakat.⁴⁸

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian *preskriptif*, yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Cilacap.

⁴⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 11.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan juga data primer sebagai pendukung data sekunder.

a. Data sekunder

Data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan materi penelitian.

b. Data primer

Data yang diperoleh dari wawancara dengan Pejabat Penyidik di Polres Cilacap.

E. Metode Pengumpulan Data

Sumber data diperoleh dengan melakukan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, yurisprudensi, doktrin yang berhubungan dengan obyek penelitian.

F. Metode Penyajian Data

Data yang disajikan berbentuk uraian yang disusun secara sistematis, dan didalam penyusunannya dibuat secara singkat dan jelas, sehingga penyusunan data dapat dipahami dan mudah dipelajari.

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif yaitu data yang diperoleh akan dianalisis dengan pembahasan dan penjabaran hasil-hasil penelitian dengan mendasarkan pada norma-norma dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Polres Cilacap. Tim penyidik selalu menggunakan teknik-teknik dalam usaha mengungkap setiap kejahatan yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Cilacap yaitu dengan cara mengambil sidik jari tersangka yang terdapat di Tempat Kejadian Perkara. Berdasarkan hasil penelitian, data yang dikaji terdiri atas data sekunder yang merupakan data utama dalam penulisan, dan data primer yang berperan dalam mendukung data sekunder.

1. Data sekunder diperoleh dari buku Himpunan Petunjuk Teknis tentang Daktiloskopi yang dibagi menjadi 9 (sembilan) petunjuk teknis, yaitu:
 - a. Petunjuk Teknis No. Pol.: Juknis/01/III/2000 Tentang Pencarian Sidik Jari Laten di Tempat Kejadian Perkara;
 - b. Petunjuk Teknis No. Pol.: Juknis/02/III/2000 Tentang Pengembangan Sidik Jari Laten Dengan Serbuk Serta Pemindahannya/ Pengangkatannya (*Lifting*) di Tempat Kejadian Perkara;
 - c. Petunjuk Teknis No. Pol.: Juknis/03/III/2000 Tentang Pengembangan Sidik Jari Laten Secara Kimia;
 - d. Petunjuk Teknis No. Pol.: Juknis/04/III/2000 Tentang Pengembangan Sidik Jari Laten pada Kulit Manusia.

- e. Petunjuk Teknis No. Pol.: Juknis/05/III/2000 Tentang Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari.
 - f. Petunjuk Teknis No. Pol.: Juknis/06/III/2000 Tentang Pengambilan Sidik Jari yang Baik.
 - g. Petunjuk Teknis No. Pol.: Juknis/07/III/2000 Tentang Penyimpanan Kartu Sidik Jari dan Kartu-kartu Pembantunya Secara Manual Penuh.
 - h. Petunjuk Teknis No. Pol.: Juknis/08/III/2000 Tentang Perumusan Sidik Jari.
 - i. Petunjuk Teknis No. Pol.: Juknis/09/III/2000 Tentang Pengambilan Sidik Telapak Kaki Bayi.
2. Data Primer, diperoleh dari hasil wawancara dengan Brigadir Bambang Supriyanto, S.H. pada hari Selasa, 19 April 2011.

Ad 1. Data Sekunder

Penyelenggaraan daktiloskopi memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas kepolisian terutama dalam proses penyidikan tindak pidana. Melalui penyelenggaraan daktiloskopi yang baik, identifikasi tersangka dan atau korban dalam proses penyelesaian kasus-kasus non pidana, dapat dilakukan secara cepat dan akurat. Oleh karena itu agar identifikasi tersangka dan atau korban melalui sidik jari (daktiloskopi) dapat dilakukan dengan baik, cepat dan akurat diperlukan suatu petunjuk teknis tentang pencarian sidik jari laten di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Dasar hukum yang dapat mendukung petunjuk teknis tentang Daktiloskopi diantaranya sebagai berikut :

- a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 5 Ayat (1) butir b3 dan Pasal 7 ayat (1) butir f.
- b. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara.

1. Pencarian Sidik Jari Laten di Tempat Kejadian Perkara

Pencarian sidik jari laten di Tempat Kejadian Perkara (TKP) membutuhkan suatu persiapan yang cermat. Dalam mempersiapkan pelaksanaan tersebut, membutuhkan minimal satu orang petugas, baik yang tergabung dalam tim pengolahan TKP atau berdiri sendiri serta harus mempersiapkan peralatan yang lengkap biasanya ada dalam *Fingerprint Kit*, yang terdiri dari :

- a. Serbuk sidik jari (*powder*);
- b. Kuas;
- c. Pita pengangkat (*lifter*);
- d. Gunting;
- e. Jepit/pinset;
- f. Senter;
- g. Kaca pembesar (*loop*);
- h. Kamera (kamera sidik jari dan film);
- i. Sarung tangan. (Petunjuk Teknis No. Pol.: Juknis/01/III/2000 : 7)

Langkah-langkah dalam melakukan pencarian sidik jari, diantaranya adalah :

- a. Gunakanlah sarung tangan atau sapu tangan atau dengan cara lain waktu sedang melakukan pencarian atau ketika memegang benda, sehingga tidak meninggalkan sidik jari sendiri pada benda tersebut.
- b. Lakukanlah pencarian setelah pemotretan TKP selesai, dengan meneliti tempat-tempat atau benda-benda yang diduga telah dipegang atau disentuh oleh tersangka atau pelaku.

- c. Pastikanlah letak sidik jari laten pada permukaan guna dikembangkan dan diangkat atau dipindahkan ke dalam *lifter*, dengan cara sebagai berikut :
 - 1) Dengan sorotan senter dari sudut tertentu, sidik jari laten pada permukaan benda terlihat jelas;
 - 2) Dengan mendekatkan kepala (petugas) pada permukaan benda dan melihatnya dari berbagai sudut.
 - 3) Meniup permukaan benda sehingga memberi kelembaban yang memungkinkan sidik jari laten dapat terlihat.
 - 4) Langsung menaburi permukaan tersebut dengan serbuk.
- d. Setelah pemberian serbuk, sidik jari laten tersebut hendaknya dipotret terlebih dahulu sebelum diangkat dengan *lifter*.
- e. Benda-benda yang diduga mengandung sidik jari laten, yang dapat diangkat, dapat dibawa ke kantor untuk diproses dengan lebih teliti.
- f. Orang-orang yang diduga ada kaitannya dengan TKP di ambil sidik jarinya untuk mempersempit pencarian tersangka atau pelaku.
- g. Bila tersangka atau pelaku telah diketahui, tetapi tidak berada di TKP atau belum tertangkap, catatlah nama serta keterangan lainnya guna pencarian di file sidik jari. (Petunjuk Teknis No. Pol.: Juknis/01/III/2000 : 7-9)

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pencarian sidik jari laten di Tempat Kejadian Perkara sebagai berikut :

- a. Bila tersangka tertangkap pada saat itu di TKP atau tertangkap selang beberapa waktu kemudian agar segera diambil sidik jarinya dan dipotret.
- b. Mayat (korban meninggal) yang ditemukan di TKP termasuk korban bunuh diri, harus diambil sidik jarinya.
- c. Agar selalu berkoordinasi atau bekerjasama dengan penyidik yang menangani kasus tersebut. (Petunjuk Teknis No. Pol.: Juknis/01/III/2000 : 9)

2. Pengembangan Sidik Jari Laten dengan Serbuk serta Pemindahannya atau Pengangkatannya (*Lifting*)

Melakukan suatu pengembangan sidik jari laten dengan serbuk serta pemindahannya, secara teknis pelaksanaannya memerlukan persiapan yang matang. Dalam mempersiapkan

pelaksanaan tersebut, membutuhkan minimal dua orang petugas, baik yang tergabung dalam tim pengolahan TKP atau berdiri sendiri.

Langkah-langkah pengembangan dan pemindahan tersebut, yaitu :

- a. Pengembangan Sidik Jari Laten
 - 1) Dengan serbuk biasa;
 - 2) Dengan serbuk magnet.
- b. Pemindahan atau Pengangkatan Sidik Jari Laten
 - 1) Dengan *lifter* tembus pandang;
 - 2) Dengan *rubber lifter/lifter* karet. (Petunjuk Teknis No. Pol.: Juknis/02/III/2000 : 19)

3. Pengembangan Sidik Jari Laten Secara Kimia

Peralatan-peralatan yang biasa digunakan adalah :

- a. Kantong plastik transparan (ukuran lebih kurang 23 x 33 cm) dan 3 gr (1 ampul) *kristal yodium*.
- b. Pipa penguap yodium (*iodiom fuming pipe/gun*)
 - 1) Pipa kaca yang salah satu ujungnya ada slang karet/plastik;
 - 2) Isinya tersusun sebagai berikut:
 - a) *Glass wool* atau kapas;
 - b) *CaCl* (*calcium chloride*) lebih kurang 5gr/2,5 cm panjang;
 - c) *Glass wool* atau kapas;
 - d) Kristal yodium lebih kurang 3 gr (1 ampul);
 - e) *Glass wool* atau kapas.
 - 3) Lemari Penguap Yodium (*iodine fuming cabinet*);
 - a) Lemari kecil yang kedua sisinya dari kaca;
 - b) Pada alas lemari ada alat pemanas (lampu, listrik) yang ada di atasnya terletak sebuah mangkuk tempatmkristal yodium diletakan;
 - c) Sisi atas lemari dapat dibuka dan ditutup, serta ada tempat gantungan kertas;
 - d) Tidak bisa dibawa ke TKP (digunakan di kantor).
 - 4) Kamera (kamera sidik jari), film, pinset dan sarung tangan. (Petunjuk Teknis No. Pol.: Juknis/03/III/2000: 31-32)

Pengembangan sidik jari laten secara kimia dapat dilakukan dengan menggunakan larutan kimia. Langkah-langkah dalam mengembangkan sidik jari laten secara kimia sebagai berikut :

a. Pengembangan Sidik Jari Laten dengan Yodium

Untuk mengembangkan sidik jari laten pada benda-benda yang berpori seperti kertas, karton, surat kabar, kayu yang tidak dicat dan lain-lain, dengan cara :

- 1) Dengan menggunakan kantong plastik transparan.
 - a) Masukkan lebih kurang 3 gr (1 ampul) *kristal yodium* kedalam kantong plastik;
 - b) Kantong plastik sedikit dibuka agar *kristal yodium* cepat menguap. Kemudian masukkan kertas atau dokumen yang dicurigai dan kantong plastik tersebut digoyang-goyang untuk mempercepat penguapan *kristal yodium*. Uap yodium akan menyebabkan sidik jari laten muncul dalam warna coklat kekuning-kuningan;
 - c) Bila sidik jari laten tersebut telah cukup kontras keluarkan kertas atau dokumen tersebut dan akan berangsur-angsur hilang (untuk menimbulkan lagi, dekatkan sidik jari laten tersebut pada uap yodium)
- 2) Dengan menggunakan pipa peniup yodium (*iodine fuming gun/pipe*).
 - a) Setelah pipa diisi sesuai susunan diatas, ujung pipa ditempatkan lebih kurang 2 cm diatas permukaan yang dicurigai;
 - b) Melalui selang karet/plastik, hembuskan udara ke dalam pipa tersebut. Udara kering/panas dari hembusan tersebut menyebabkan *kristal yodium* menguap. Untuk mempercepat penguapan, bagian pipa dimana *kristal yodium* berada digenggam dengan tangan atau dibakar dengan korek api;
 - c) Gerakkanlah ujung pipa tempat uap yodium keluar kepermukaan benda yang dicurigai. Sidik jari laten timbul dalam warna coklat kekuning-kuningan;
 - d) Bila sidik jari laten tersebut telah cukup kontras, segeralah dipotret karena ia akan berangsur-angsur hilang;

- e) Sisa *kristal yodium* masih dapat dipakai lagi, asal setelah dipakai segera dituang kembali dalam botol lalu ditutup rapat-rapat.
- 3) Dengan menggunakan lemari penguap yodium (*iodine fuming cabinet*).
 - a) Tuangkan kristal yodium kedalam mangkuk;
 - b) Letakkan mangkuk tersebut di atas alat pemanas lampu, alat pemanas yang menggunakan listrik;
 - c) Setelah *kristal yodium* menguap dan memenuhi seluruh ruangan lemari, gantungkan kertas/dokumen yang dicurigai dalam lemari tersebut;
 - d) Sidik jari laten timbul dalam warna coklat kekuning-kuningan. Bila telah cukup kontras, keluarkanlah kertas/dokumen tersebut dari lemari serta potretlah sidik jari tersebut. (Petunjuk Teknis No. Pol.: Juknis/03/III/2000 : 35-36)
- b. Pengembangan sidik jari laten dengan larutan *ninhydrin*.

Cara ini baik untuk mengembangkan sidik jari laten yang terdapat pada kertas, karton, surat kabar, kayu yang tidak dicat, dengan cara :

- 1) Siapkan peralatan seperti :
 - a) Tabung pengukur, baskom, aseton, kristal/serbuk *ninhydrin*. Larutan *ninhydrin* kadar 0,6% dengan formula sebagai berikut :
 - (1). 5 gr serbuk *ninhydrin* + 825 ml *aseton*;
 - (2). 6 gr serbuk *ninhydrin* + 1000 ml *aseton*;
 - (3). 20 gr serbuk *ninhydrin* + 3300 ml *aseton*.
 - b) Sarung tangan, pinset/jepit;
 - c) Kuas besar (yang biasa digunakan untuk mencat);
 - d) Alat pemanas (setrika listrik, oven, *hair dryer*);
 - e) Kamera (kamera sidik jari), film.
 - f) Ada larutan yang biasanya sudah disiapkan dalam “*aerosol*”, sebagai kelengkapan “*Fingerprint Kit*”, kurang efektif karena lama disimpan. Karena itu sebaiknya larutan disiapkan sendiri saat akan digunakan.
- 2) Kertas atau dokumen yang dicurigai dicelupkan/direndam dalam larutan (dapat juga disemprot atau dioles dengan memakai kuas);

- 3) Setelah seluruh permukaan basah terkena larutan, kertas atau dokumen dikeluarkan dari dalam larutan;
 - 4) Kertas atau dokumen dianginkan dalam ruangan yang cukup ventilasinya. Sidik jari laten akan muncul dalam warna coklat merah kekuning-kuningan dalam waktu 1 atau 2 jam, bahkan 24 jam kemudian;
 - 5) Untuk mempercepat munculnya sidik jari laten tersebut dapat ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:
 - a) Setelah kertas dokumen dikeluarkan dari larutan, kertas atau dokumen dianginkan dengan *hairdryer*;
 - b) Setelah permukaan kertas/dokumen tersebut kering, kertas/dokumen dalam oven lebih kurang 100 derajat celcius atau kertas/dokumen tersebut diseterika dengan seterika listrik.
 - 6) Bila sidik jari laten yang timbul telah kontras dengan dipotret sebelum berangsur-angsur hilang;
 - 7) Perlu diwaspadai bahwa larutan *ninhydrin* dapat merusak kulit tubuh, baunya menyengat hidung dan mudah terbakar. Oleh karena itu pakailah sarung tangan serta pinset serta jauhkan dari api. (Petunjuk Teknis No. Pol.: Juknis/03/III/2000 : 36-37)
- c. Pengembangan sidik jari laten dengan larutan *silver nitrate*

Baik sekali untuk mengembangkan sidik jari laten pada kertas, karton, surat kabar, kayu tidak di cat/divernis, dengan cara :

- 1) Siapkan peralatan seperti :
 - a) Tabung pengukur, baskom, kristal/silver nitrate, ait suling *aquades*) untuk membuat larutan. Larutan *nitrate* dengan kadar 3% dengan formula sebagai berikut:
 - (1). 113,40 gr serbuk *nitrat*+ 4,5 L *aquades*;
 - (2). 28,35 gr serbuk *nitrat* + 1,136 L *aquades*;
 - (3). 14,18 gr serbuk *nitrat* + 568 ml *aquades*.
 - b) Sarung tangan, pinset;
 - c) Kuas besar (yang biasa digunakan untuk mencat);
 - d) Lampu berkekuatan besar 1000 watt (*photo flood*);
 - e) Kamera sidik jari.
- 2) Dengan menggunakan kuas, larutan dioleskan pada permukaan kertas/dokumen yang dicurigai. Gerakan kuas searah dan sekali jalan;
- 3) Setelah seluruh permukaan kertas/dokumen dioles dengan larutan, kertas/dokumen dibiarkan kering sendiri;

- 4) Permikaan kertas/dokumen kemudian disinari dengan sinar matahari atau lampu 1000 watt. Sidik jari laten muncul dalam warna coklat kemerah-merahan;
 - 5) Bila sidik jari laten tersebut telah cukup kontras harus segera di jauhkan dari sinar atau cahaya dan segera dipotret sebab jika tidak, sidik jari laten tersebut menjadi hitam/gelap;
 - 6) Bila sebagian dari sidik jari laten tersebut telah cukup kontras sedang bagian lainnya belum, maka cara berikut ini dapat ditempuh:
 - a) Bagian yang telah cukup kontras ditutup dengan kertas;
 - b) Bagian yang belum kontras disinari sampai cukup kontras;
 - c) Kertas/dokumen dijauhkan dari sinar/cahaya, kemudian sidik jari laten tersebut dipotret.
 - 7) Larutan *silver nitrate* sifatnya sangat korosif, dapat meninggalkan bintik-bintik hitam/luka pada kulit tubuh atau merusak pakaian.
 - 8) Gunakanlah sarung tangan atau pinset bila sedang mencampur/menggunakan larutan tersebut. (Petunjuk Teknis No. Pol.: Juknis/03/III/2000 : 37-38)
- d. Pengembangan sidik jari laten dengan larutan *gentian violet*.
- Baik sekali untuk mengembangkan sidik jari laten pada selotip atau isolasi (bahan yang biasa digunakan dalam membungkus kado, paket, merakit bahan peledak buatan sendiri, menutup kaca jendela yang retak/pecah), dengan cara :
- 1) Siapkan peralatan seperti:
 - a) Tabung/timbangan/alat pengukur, baskom, kristal/serbuk violet, kristal/serbuk phenol, air suling (*aquades*) dan *ethanol*. Larutan *gentian violet* dengan formula sebagai berikut:
 - (1). 5 serbuk violet + 10 gr serbuk phenol + 50 ml *ethanol*;
 - (2). Setelah campuran menjadi rata, diberikan lagi 500 ml *aquades*.
 - b) Larutan *ninhydrin*;
 - c) Kapas;
 - d) Sarung tangan pinset;
 - e) Kamera sidik jari dan film.

- 2) Isolasi/selotip yang dicurigai dibuka sedikit demi sedikit sambil diisolasi dengan larutan *ninhydrin* (gunakan kapas yang telah dibasahi larutan *ninhydrin*) sehingga isolasi/selotip tersebut terbuka/terlepas;
 - 3) Celupkan (hanya lewatkan saja) isolasi/selotip tersebut kedalam larutan gentian violet, kemudian diangkat kemudian dicuci dengan air yang sedang mengalir lalu dikeringkan/diangkat, sidik jari laten akan timbul;
 - 4) Bila sidik jari laten yang timbul telah cukup kontras segeralah dipotret;
 - 5) Gunakan sarung tangan dan pinset bila sedang mencampur atau menggunakan larutan tersebut;
 - 6) Jangan lupa menggunakan larutan ini untuk mengembangkan sidik jari laten dalam kasus - kasus peledakan yang diduga menggunakan bahan peledak buatan/rakitan sendiri. Karena pada selotip/isolasi yang digunakan untuk merakit bahan peledak tersebut, biasanya terdapat sidik jari laten. (Petunjuk Teknis No. Pol.: Juknis/03/III/2000: 38-39)
- e. Pengembangan sidik jari laten dengan larutan *molybdenum disulfide* (SPR/Small Particel Reagent).

Baik sekali digunakan untuk mengembangkan sidik jari laten pada permukaan yang basah, berlemak atau berkarat.

- 1) Siapkan peralatan seperti :
 - a) Tabung/timbal/alat pengukur, baskom, kristal/serbuk *molybdenum disulfide* (MoS_2), air, semprotan. larutan *molybdenum disulfide* (SPR) dengan formula sebagai berikut:
“30 gr *molybdenum disulfide* (MoS_2) + 1 liter air”
 - b) Pipa pengangkat;
 - c) Sarung tangan, pinset;
 - d) Kamera sidik jari film.
- 2) Larutan dimasukkan ke dalam semprotan dan siap untuk digunakan;
- 3) Larutan disemprotkan pada (permukaan yang dicurigai permukaan yang basah, berlemak, berkarat);
- 4) Cuci/bilas permukaan tersebut dengan air, sidik jari laten akan timbul;
- 5) Bila sidik jari tersebut telah cukup kontras, potretlah sidik jari laten tersebut atau angkatlah dengan pipa pengangkat

(*lifter*/selotip). (Petunjuk Teknis No. Pol.: Juknis/03/III/2000: 39)

- f. Pengembangan sidik jari laten dengan *super glue* (*cyanocarilate/C.A*).

Baik sekali digunakan untuk mengembangkan sidik jari laten pada permukaan yang keras seperti plastik, metal dan kayu, dengan cara :

- 1) Siapkan peralatan seperti :
 - a) Lem *super glue*;
 - b) Kotak/lemari/kantong yang ditutup;
 - c) Air panas/hangat, gelas/mangkok/tempat air panas dituangkan;
 - d) Serbuk sidik jari;
 - e) Pipa pengangkat (*lifter*/selotip);
 - f) Sarung tangan/pinset;
 - g) Kamera sidik jari dan film;
 - h) Pada objek/benda kecil :
 - (1). Letakkan benda tersebut didalam kotak/ lemari/ kantong yang dapat ditutup;
 - (2). Ambil segelas air panas/hangat dan letakkan didalam kotak;
 - (3). Buka 1 (satu) lembar lem super glue dan tempelkan pada dinding kotak dengan selotip dekat benda tadi;
 - (4). Tutuplah kotak tersebut dan penguapan mulai berlangsung;
 - (5). Sesudah 20-30 menit, periksalah benda tersebut untuk memastikan apakah ada sidik jari laten putih yang timbul;
 - (6). Jika lebih banyak penguapan dibutuhkan, masukkan benda itu kedalam kotak dan periksalah secara periodik sehingga diperoleh hasil yang diinginkan;
 - (7). Potretlah sidik jari laten putih tersebut, kemudian diberi serbuk (pengembangan dengan metode serbuk) lalu angkat dengan *lifter*/selotip.
 - i) Pada mobil (interior)
 - (1). Buka 3-4 lembar lem super glue, tergantung ukuran mobil, dan tempelkan di dalam mobil

dekat benda-benda yang dicurigai (kaca belakang, jendela, *dashboard*) dengan selotip;

- (2). Tempatkan mobil diluar ruangan atau disinari matahari;
 - (3). Tutup semua pintu mobil dan biarkan penguapan berlangsung selama 45 menit sampai 2 jam;
 - (4). Periksalah benda-benda yang dicurigai itu, apakah ada sidik jari laten putih keras yang menempel padanya;
 - (5). Jika lebih banyak penguapan dibutuhkan, tutup kembali pintu mobil dan biarkan penguapan terus berlangsung; periksalah secara periodik hingga diperoleh hasil yang diinginkan;
 - (6). Bila hasilnya sudah memuaskan, buka pintu mobil agar terjadi pergantian udara dalam mobil kemudian lepaskan lembar lem super glue;
 - (7). Beri serbuk dan angkat dengan lifter/selotip atau dipotret.
- j) Dalam ruang/kamar
- (1). Buka beberapa lem super glue (jumlah lembaran tergantung luasnya ruangan; ruangan $8 \times 10 = 5$ lembar; ruangan $12 \times 12 = 10$ lembar) dan tempelkan dekat benda-benda yang dicurigai di sebelah atas benda-benda itu stop kontak, telepon, lampu, jendela);
 - (2). Tutup pintu dan jendela ruangan serta biarkan penguapan berlangsung selama 1-2 jam;
 - (3). Periksalah benda-benda tersebut, apakah ada sidik jari laten putih keras yang menempel padanya. Jika lebih banyak penguapan dibutuhkan, biarkan penguapan berlangsung 12 jam;
 - (4). Sesudah penguapan selesai, buka pintu dan jendela ruangan, kembangkan sidik jari laten putih itu dengan serbuk lalu diangkat dengan lifter atau dipotret.

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

- 1) Barang bukti berupa dokumen/surat sebelum dikembangkan secara kimia terlebih dahulu harus dipotret;
- 2) Aplikasi metode kimia (pada dokumen/surat barang bukti) agar selalu memperhatikan urutan-urutan aplikasi; *yodium ninhydrin* dan *silvernitrat* (urutan aplikasi tersebut jangan dibalik). (Petunjuk Teknis No. Pol.: Juknis/03/III/2000 : 39-42)

4. Pengembangan Sidik Jari Laten pada Kulit Manusia

Pengembangan sidik jari laten pada kulit manusia terdiri dari dua metode, yaitu :

- a. Pengembangan sidik jari laten pada kulit manusia dengan metode serbuk.
 - 1) Dengan kuas magnit dan serbuk magnit atau dengan kuas biasa/*fiberglass* dan serbuk *volcanic*, serbuk diaplikasikan langsung pada kulit manusia/korban, terutama pada bagian-bagian tubuh yang biasanya disentuh/dipegang oleh pelaku/tersangka seperti :
 - a) Pergelangan tangan;
 - b) Lengan bagian atas;
 - c) Daerah sekitar telinga;
 - d) Daerah sekitar leher;
 - e) Daerah sekitar buah dada dan pangkal paha (kasus seksual);
 - f) Daerah sekitar pergelangan kaki.
 Bila sidik jari laten timbul, segeralah dipotret dan diangkat dengan *lifter*/selotip.
 - 2) Uji coba menunjukkan bahwa sidik jari laten pada kulit manusia hidup dapat bertahan rata – rata 1 – 1,5 jam, sedangkan pada mayat tergantung dari kondisi mayat. Karena itu disarankan untuk segera memproses sidik jari laten yang mungkin terdapat pada mayat ketika diketemukan;
 - 3) Aplikasi serbuk pada kulit manusia hendaknya dilakukan dengan hati – hati dan penuh kesabaran.
- b. Pengembangan sidik jari laten pada kulit manusia dengan metode pemindahan perak yodium.
 - 1) Dengan pipa peniup yodium, ditiupkan uap yodium ke kulit (bagian tubuh) korban yang diduga telah disentuh/dipegang oleh tersangka;
 - 2) Tekankan, secara perlahan dan hati-hati, lempengan/plat perak langsung pada kulit yang telah ditiupi dengan uap yodium tersebut;
 - 3) Angkat lempengan/plat perak tersebut dari kulit. Sidik jari laten yang diduga terdapat pada kulit akan beralih ke atas lempengan/plat perak tersebut, sering kali dalam warna coklat pucat;
 - 4) Arahkan lempengan/plat perak itu ke sumber cahaya (matahari, *photoflood*, sinar ultra violet). Sidik jari laten akan timbul berangsur-angsur pada lempengan/plat perak tersebut. Sering kali dibutuhkan waktu penyinaran yang

lama untuk membuat sidik jari laten tersebut. Sidik jari laten pada lempengan/plat perak tersebut dapat bertahan lama/permanen, posisinya berlawanan dengan posisi sidik jari laten tersebut ketika masih berada pada kulit. (Petunjuk Teknis No. Pol.: Juknis/04/III/2000 : 49-51)

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

- a. Pengembangan sidik jari laten pada mayat harus segera dilakukan bila dipandang perlu;
- b. Mayat yang sudah terendam dalam air atau yang berada di udara terbuka selama waktu tertentu, kecil kemungkinan dapat ditemukan sidik jari laten. (Petunjuk Teknis No. Pol.: Juknis/04/III/2000 : 51)

5. Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari

Peralatan yang dipakai terdiri dari :

1. *Fingerprint Comparator* atau alat yang paling umum yaitu kaca pembesar.
2. Jangka untuk membantu menentukan jarak antara titik persamaan yang satu dengan lainnya.
3. Spidol (pilih warna yang menyolok seperti warna merah) untuk membubuhi titik persamaan. (Petunjuk Teknis No. Pol.: Juknis/05/III/2000 : 57)

Langkah-langkah dalam pemeriksaan perbandingan sidik jari adalah:

1. Sebelum sidik jari laten dibandingkan sidik jari tersangka atau sidik jari yang tersimpan di file atas nama orang tertentu, terlebih dahulu sidik jari laten tersebut dibandingkan dengan sidik jari orang-orang yang secara sah telah memegang sesuatu di TKP (*elimination prints*).
2. Menentukan asal jari.
3. Menentukan persamaan/keidentikan dua sidik jari.
Untuk menentukan apakah 2 (dua) sidik jari sama atau tidak, 4 (empat) hal/faktor yang harus dinilai:
 - a. Bentuk pokok lukisan.
 - b. Karakteristik garis-garis kapiler sidik jari (*galton detail*).
 - c. Jumlah titik persamaan (*galton detail* yang sama jenisnya, bentuk arah dan posisi).
 - d. Hubungan antara titik persamaan.
4. Cara/teknik pemeriksaan perbandingan sidik jari:
 - a. Sidik jari laten atau sidik jari yang dicurigai diletakkan berdampingan dengan sidik jari yang diketahui pada

fingerprint comparator kemudian dengan menggunakan peralatan tersebut diatas segeralah mulai membandingkan kedua sidik jari tersebut.

- b. Tentukan apakah kedua sidik jari tersebut mempunyai bentuk pokok lukisan yang sama. Bila bentuk pokok lukisan tidak utuh, perhatikan apakah aliran garis-garis papiler antara kedua sidik jari tersebut (sama/tidak).
- c. Bila bentuk pokok lukisan kedua sidik jari tersebut berbeda atau tidak sama, sudah pasti kedua sidik jari tersebut tidak identik, karena itu pemeriksaan lebih lanjut tidak perlu dilakukan. (Petunjuk Teknis No. Pol.: Juknis/05/III/2000: 57-60)

6. Pengambilan Sidik Jari Yang Baik

- a. Pengambilan sidik jari.
 - 1) Peralatan minimal yang diperlukan :
 - a) Sepotong kaca/marmer/plat yang permukaannya rata/licin.
 - b) Tinta daktiloskopi (jangan gunakan bantalan stempel).
 - c) Penggilingan tinta dari karet (roller); berdiameter lebih kurang 2cm, panjang 5-6 cm.
 - d) Penjepit kartu sidik jari (formulir AK-23).
 - e) Formulir AK-23 (blanko kartu sidik jari) yang standar, terbuat dari kertas tebal licin berwarna putih, ukuran 20 x20 cm.
 - 2) Peralatan yang lengkap biasanya tersedia dalam *stamping kit*.
- b. Pengambilan sidik telapak tangan dan telapak kaki.
 - 1) Peralatan minimal yang diperlukan :
 - a) Sepotong kaca/marmer/plat yang permukaannya rata/licin.
 - b) Tinta daktiloskopi
 - c) Penggilingan tinta dari karet (roller); diameter 6-12 cm.
 - d) Kertas HVS atau kartu khusus.
 - 2) Peralatan untuk pengambilan sidik jari dapat digunakan.
- c. Pengambilan sidik jari mayat.
 - 1) Peralatan yang biasa digunakan untuk pengambilan sidik jari.
 - 2) Sendok mayat.
 - 3) Alat suntik, cairan pengembang jari mayat (*tissue builder*), cairan pembersih jari mayat (*finger clesner*), cairan pembersih alat suntik (*tissue bulder solvent*).
 - 4) Sarung tangan dan masker. (Petunjuk Teknis No. Pol.: Juknis/06/III/2000: 67-68)

Langkah-langkah pengambilan sidik jari :

1. Pengambilan sidik jari
 - a. Pengisian data pada formulir AK-23 dan data tersebut harus dicocokkan dengan data yang tertera pada KTP yang bersangkutan.
 - b. Diisi oleh petugas. (Petunjuk Teknis No. Pol.: Juknis/06/III/2000 : 68)
2. Pengambilan sidik jari pada formulir AK-23.
 - a. Pengambilan/perekaman sidik jari pada formulir AK-23, dilakukan dengan cara menggulingkan (*rolled impression*) dan dengan cara tekan rata (*plain impression*).
 - b. Pengambilan sidik jari harus benar/baik, agar kartu sidik jari dapat diolah baik secara manual atau dengan komputer.
 - c. Formulir AK-23 yang baku/standar adalah formulir yang terbuat dari kertas tebal berwarna putih dengan ukuran 20 x 20 cm.
 - d. Gunakanlah selalu tinta daktiloskopi. Tinta stensil hitam dapat digunakan jika tinta daktiloskopi tidak tersedia.
 - e. Langkah-langkah pengambilan sidik jari adalah sebagai berikut:
 - 1) Tuangkan sejumlah tetes tinta daktiloskopi di alat kaca. Dengan menggunakan roller, tinta daktiloskopi diratakan.
 - 2) Formulir AK-23 supaya diisi oleh yang akan diambil sidik jarinya dan petugas.
 - 3) Tempatkan formulir/kartu sidik jari tersebut pada penjepit sehingga kolom untuk jari-jari tangan kanan siap dipakai.
 - 4) Pegang tangan kanan yang bersangkutan dan minta kepadanya untuk berdiri sebelah kanan anda sedikit kebelakang. Periksa jari-jari tangan yang bersangkutan. Jika garis-garis papilernya halus anda hanya memerlukan tekanan sedikit saja pada saat mengambil/merekam sidik jari yang bersangkutan; tetapi apabila garis-garis papiler itu besar/kasar anda harus menekannya cukup kuat.
 - 5) Minta orang tersebut agar bersikap santai. Dengan tangan kanan anda, peganglah ibu jari kanan orang tersebut (tangan kiri akan mengontrol tekanan), gulingkan jari tersebut pada tepi plat kaca bertinta (jari digulingkan dari sisi kuku yang satu ke sisi kuku yang lainnya). Buatlah demikian juga untuk jari-jari tangan kanan.
 - 6) Gulingkan jari-jari itu satu kali pada formulir atau kartu sidik jari sesuai dengan kolomnya masing-masing (1/3 ruas kedua dari ujung jari juga terekam).

- 7) Geser formulir/kartu sidik jari sedemikian rupa sehingga kolom untuk jari-jari tangan kiri siap untuk digunakan. Berilah tinta lagi pada plat kaca atau ratakan kembali tinta dengan *roller* jika perlu.
 - 8) Mintalah orang tersebut berdiri disebelah kiri anda, peganglah tangan kirinya dan lakukan prosedur seperti pada tangan kanan.
 - 9) Geser formulir/kartu sidik jari sedemikian rupa sehingga kolom “tangan kiri empat bersama” dan lainnya siap untuk digunakan.
 - 10) Minta orang tersebut meluruskan keempat jari tangan kirinya berdampingan (telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking). Pegang jari-jari itu dan tekan rata pada tinta. Angkat dan ulangi prosedur yang sama pada kolom yang tersedia. Lakukan prosedur seperti ini juga pada ibu jari kiri yang bersangkutan.
 - 11) Lakukan prosedur seperti prosedur diatas untuk keempat jari tangan kanan.
 - 12) Teliti hasil pengambilan sidik jari tersebut. Jika hasilnya kurang baik (terlalu tebal atau terlalu tipis), supaya diulangi pengambilannya dengan formulir AK-23 yang baru.
 - 13) Suruhlah orang tersebut membersihkan jari-jarinya dengan alat pembersih yang tersedia (bensin, sabun atau lap kain).
 - 14) Angkatlah/keluarkan kartu sidik jari itu dari penjepitnya dan catatlah jika ada jari-jari yang buntung.
 - 15) Rumuslah sidik jari tersebut dan catatlah rumus tersebut pada kolom yang tersedia.
- f. Obyek Pengambilan
- Pengambilan sidik jari dilakukan terhadap, antara lain :
- 1) Tersangka;
 - 2) Terhukum;
 - 3) Peminta SKKB, SIM, STMD dan Surat Izin Senjata Api;
 - 4) Pegawai negeri, anggota ABRI, Polsus dan Satpam;
 - 5) Pegawai perusahaan negara dan swasta;
 - 6) Pegawai bank pemerintah dan swasta;
 - 7) Karyawan hotel, TKI, TKW, dan transmigran;
 - 8) Orang asing yang masuk Indonesia. (Petunjuk Teknis No. Pol.: Juknis/06/III/2000 : 70-73)

3. Jumlah pengambil sidik jari dan pengirimannya.
 - a. Pengambilan sidik jari dilakukan dalam beberapa rangkap menurut tingkat kesatuan berdasarkan kebutuhannya.
 - b. Pada prinsipnya pengambilan sidik jari untuk Polri, PNS, orang asing atau tersangka dilakukan dalam :

- 1) Rangkap 4 : Polres dalam Polwil/Polwiltabes.
- 2) Rangkap 3 : Polres yang tidak berada dalam Polwil/Polwiltabes, Poltabes.
- 3) Rangkap 2 : Polda.
- 4) Rangkap 1 : Mabes Polri.

Untuk sidik jari tersangka, masing-masing tingkat kesatuan ditambah 1 (satu) rangkap lagi guna lampiran BAP.

- c. Kartu sidik jari tersebut setelah dibubuhi rumus lengkap segera dilakukan verifikasi dengan file setempat kemudian 1 (satu) rangkap disimpan pada file setempat, sedangkan sisanya dikirim untuk verifikasi dan penyimpanan pada file kesatuan-kesatuan atasnya.
 - d. Kartu sidik jari AK-23 yang dikirim kekesatuan atas (terutama file pusident Polri) pada kesempatan pertama untuk verifikasi:
 - 1) Tersangka (seluruhnya termasuk orang asing);
 - 2) Orang asing (STMD);
 - 3) Personil Polri;
 - 4) Personil Persip Polri;
 - 5) Siswa-siswi Sekolah Pembentukan Polri;
 - 6) Pengambilan sidik jari non kriminal lainnya, penyimpanannya pada satuan kewilayahan saja. (Petunjuk Teknis No. Pol.: Juknis/06/III/2000: 73-74)
4. Pengambilan sidik jari telapak tangan dan telapak kaki.
- a. Sidik telapak tangan
 - 1) Teteskan tinta daktiloskopi pada plat kaca dan ratakan tinta tersebut dengan *roller*.
 - 2) Gulingkan *roller* bertinta tersebut pada telapak tangan tangan yang bersangkutan atau tekanlah telapak tangan yang bersangkutan pada plat kaca yang bertinta tersebut.
 - 3) Tekanlah (tekan rata, jangan terlalu kuat tekanannya, atau jangan bergeser) telapak tangan yang bersangkutan pada kertas HVS khusus yang telah disediakan sebelumnya.
 - 4) Jika hasilnya kurang baik, ulangi prosedur di atas sampai diperoleh hasil yang baik.
 - 5) Catatlah: kasus, tanggal kejadian, nama tersangka atau korban mayat (jika diketahui), tanggal pengambilan, nama dan paraf petugas yang mengambil.
 - 6) Buatlah Berita Acara sehubungan dengan kegiatan tersebut.
 - b. Sidik telapak kaki
 - 1) Teteskan tinta daktiloskopi pada plat kaca dan ratakan tinta tersebut dengan *roller*.
 - 2) Gulingkan *roller* bertinta tersebut pada telapak tangan yang bersangkutan atau tekanlah telapak kaki yang

bersangkutan pada semua garis-garis papiler yang bertinta tersebut.

- 3) Ambil kertas HVS/kartu khusus dan lekatkan pada buku atau sepotang papan rata, lalu tekanlah pada telapak kaki yang bersangkutan (khusus untuk mayat), atau suruh yang bersangkutan menginjak kertas HVS/kartu yang sudah disediakan sebelumnya.
- 4) Jika hasilnya kurang baik (garis-garis kapiler tidak jelas atau kabur), ulangi prosedur diatas sampai diperoleh hasil yang baik.
- 5) Catatlah: kasus, tanggal kejadian, nama tersangka atau korban mayat (jika diketahui), tanggal pengambilan, nama dan paraf petugas yang mengambil. (Petunjuk Teknis No. Pol.: Juknis/06/III/2000: 74-75)

c. Obyek pengambilan

Pengambilan sidik telapak tangan dan sidik telapak kaki biasanya dilakukan untuk memperoleh bahan perbandingan agar dapat mengidentifikasi tersangka atau korban/mayat. Adapun objek pengambilan sidik telapak telapak tangan dan sidik telapak kaki adalah:

1) Tersangka.

2) Korban/mayat.

(Petunjuk Teknis No. Pol. : Juknis/06/III/2000 : 75)

5. Pengambilan sidik jari mayat

Cara/teknik pengambilan sidik jari mayat tergantung pada keadaan sidik jari mayat yang bersangkutan. Masing-masing keadaan membutuhkan cara/teknik penanganan yang berbeda, seperti berikut ini :

a. Mayat masih baru (baru saja meninggal).

1) Jari-jari mayat masih dapat digerakkan:

a) Telungkupkan mayat;

b) Ambil sidik jari dengan cara seperti biasa.

2) Jari-jari mayat sulit digerakkan:

a) Gunting formulir AK-23 pada batas kolom tangan kiri dan kanan.

b) Jepit potongan formulir tersebut pada kedua sisi sendok mayat bagian cekung dengan kolom sidik jari menghadap keluar (dapat juga pada bagian cembung)

- c) Bersihkan jari mayat dengan hati-hati, kemudian bubuhkan tinta dengan alat pembubuh tinta atau dengan roller setelah tintanya diratakan;
 - d) Cap kan jari mayat tersebut dengan menekannya pada kolom sidik jari dari formulir yang terjepit disendok mayat. Geser kolom menurut kolom sidik jarinya sehingga semua jadi terekam;
 - e) Rekatkan hasil pengamatan tersebut pada sehelai formulir AK-23 dan rumuslah sidik jari tersebut. (Petunjuk Teknis No. Pol.: Juknis/06/III/2000 : 75-76)
- b. Mayat telah kaku dan mulai membusuk.
- 1) Jari-jari mayat menggenggam :
 - a) Tarik jari-jari mayat tersebut sehingga menjadi lurus; bila jari-jari sulit diluruskan, sayatlah bagian dalam jari pada ruas kedua sehingga jari dapat diluruskan. Untuk ibu jari sayatan dilakukan antara ibu jari dan telunjuk;
 - b) Ambillah sidik jari mayat tersebut dengan menggunakan sendok mayat.
 - 2) Ujung jari-jari mayat sudah lembek (belum rusak tetapi sudah mengkerut) :
 - a) Suntikkanlah jari tersebut dengan cairan pengembang (*tissue builder*) atau air panas sehingga kulit jari mengembang. Jarum suntik ditusuk pada ujung jari atau pada bagian dalam jari antara ruas pertama dan kedua;
 - b) Ambil sidik jari mayat tersebut dengan menggunakan sendok mayat.
 - 3) Mayat mulai membusuk/awal dekomposisi (kulit jari mulai terlepas) :
 - a) Periksa kuku jari tersebut apakah masih baik atau ada bagian yang rusak. Bersihkan kulit jari tersebut dengan hati-hati;
 - b) Kulit dipasang kembali pada jari mayat atau dimasukkan dalam jari petugas sehingga pengambilan dapat dilakukan;
 - c) Jika kulit jari sudah terlepas sekali;
 - (1) Kulit jari diolesi tinta;
 - (2) Kulit jari yang bertinta tersebut dijepit diantara dua lembar kaca kemudian dipotret/direproduksi;
 - (3) Tempelkan potret sidik jari tersebut pada formulir AK-23, sesuai kolomnya dan rumuskan sidik jari mayat tersebut.
 - d) Jika kulit jari telah hilang (garis papiler pada kulit tangan masih dapat diambil walau tidak begitu

menonjol). (Petunjuk Teknis No. Pol.:
Juknis/06/III/2000 : 76-77)

c. Mayat sudah membusuk (*dekomposisi*), mengering (*mumifikasi*), terendam di air (*medok*) :

- 1) Periksa apakah jari mayat masih lengkap;
- 2) Bersihkan kotoran yang terdapat pada kulit jari dengan hati-hati;
- 3) Usahakan agar kulit jari dapat dibebaskan menjadi rata;
- 4) Oleskan tinta pada kulit jari itu kemudian dijepit diantara dua lembar kaca dan dipotret/direproduksi;
- 5) Tempelkan potret sidik jari tersebut pada formulir AK-23, sesuai kolomnya dan rumuskan sidik jari mayat tersebut. Perlu diingat bahwa pengambilan sidik jari mayat dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk dapat mengidentifikasi mayat tersebut. (Petunjuk Teknis No. Pol. : Juknis/06/III/2000 : 77-78)

d. Obyek pengambilan.

- 1) Mayat tidak dikenal (korban pembunuhan, kecelakaan).
- 2) Mayat dikenal yang kematiannya mencurigakan. (Petunjuk Teknis No. Pol. : Juknis/06/III/2000 : 78)

Hal hal yang harus diperhatikan:

1. Pengisian kartu sidik jari, diharapkan data-datanya terisi semuanya termasuk tanda tangan pengambil sidik jari dan saksi.
2. Untuk sidik jari yang dikirimkan pada Presiden Polri harus asli dan tidak boleh difotokopi.
3. Pengambilan sidik jari mayat agar berkoordinasi dengan penyidik yang menangani kasus tersebut. (Petunjuk Teknis No. Pol. : Juknis/06/III/2000 : 78)

7. Penyimpanan Kartu Sidik Jari dan Kartu-kartu Pembantunya secara Manual Penuh

Teknis pelaksanaan penyimpanan kartu sidik jari dan kartu-kartu pembantunya secara manual penuh sebagai berikut :

a. Persiapan

- 1) Petugas pelaksana penyimpanan kartu sidik jari dan kartu pembantunya secara manual penuh adalah petugas

identifikasi dari tingkat pusat sampai dengan satuan kewilayahan yang telah mampu melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan ketentuan (petugas yang telah mengikuti pendidikan kejuruan atau penataran identifikasi) atau telah berpengalaman dalam penyimpanan sidik jari.

2) Peralatan terdiri dari :

- a) Lemari khusus untuk penyimpanan file AK-23 dan AK-24.
- b) Magnifier/loop.
- c) Mesin ketik.

(Petunjuk Teknis No. Pol.: Juknis/06/III/2000 : 85)

b. Langkah-langkah pencarian dan penemuan kembali

Sebelum dilakukan penyimpanan kartu sidik jari secara manual, ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan penyimpanan meliputi :

1. Perumusan

- a) Setiap kartu sidik jari (AK-23) harus dibubuhi rumus lengkap.
- b) Pembuatan kartu nama
Kartu sidik jari yang sudah dirumus kemudian dibuatkan kartu nama (AK-23).

2. Penyimpanan

- a) Penyortiran.
- b) Penyimpanan.
 - 1) Kartu sidik jari;
 - 2) Kartu nama;
 - a. Tempat penyimpanan diadakan pemisahan antara tersangka/bukan tersangka.
 - b. Apabila nama sama tetapi rumus sidik jari berbeda, disusun menurut rumus pertama (penyebut yang lebih kecil di depan).
 - c. Pada waktu penyimpanan kartu nama yang baru harus senantiasa diperhatikan kemungkinan identiknya dengan kartu nama yang telah tersimpan.
 - d. Identik
- 3) Urutan penyimpanan kartu sidik jari (*filing sequence*)
kartu sidik jari adalah sebagai berikut :
 - a. *Rumus primary*.
 - b. *Rumus secondary*.
 - c. *Rumus Subsecondary*

- d. *Rumus Final.*
- e. *Rumus Key.*
- f. *Rumus Major.*
- g. *Rumus Second Subsecondary.* (Petunjuk Teknis No. Pol.: Juknis/06/III/2000 : 85-94)

Hal-hal yang perlu diperhatikan :

1. Penyimpanan kartu (*filing*) kartu sidik jari berikut pembantunya secara teratur tiap kali kesatuan mulai tingkat Polres merupakan suatu hal yang mutlak bagi pelaksanaan identifikasi.
2. Apabila ditemukan kartu sidik jari yang diperkirakan sama rumus/datanya dengan kartu sidik jari yang disimpan harus dilakukan verifikasi untuk menentukan apakah kedua sidik jari tersebut (kartu sidik jari yang baru telah tersimpan di file berdasarkan dari satu orang atau bukan).
3. Apabila belum ada lemari khusus dapat dibuat sendiri kotak-kotak dari bahan yang sederhana seperti triplek atau karton, yang penting adalah penyimpanannya dilakukan menurut ketentuan. (Petunjuk Teknis No. Pol.: Juknis/07/III/2000 : 94)

8. Perumusan Sidik Jari

Peralatan terdiri dari:

- a. Kartu sidik jari;
- b. Loop/kaca pembesar;
- c. Alat tulis. (Petunjuk Teknis No. Pol.: Juknis/08/III/2000 : 107)

1. Langkah-langkah dalam melakukan perumusan sidik jari :
 - a. Pada waktu melakukan perumusan sidik jari langkah pertama adalah membubuhi *blocking out* yaitu membubuhkan tanda pada tiap-tiap kolom kartu sidik jari yang menunjukkan interpretasi mengenai bentuk pokok lukisan, sesuai dengan bentuk pokok lukisan yang ada.
 - b. *Blocking out*
Bentuk pokok lukisan/dibubuhkan dibawah masing-masing kolom sidik jari.
 - c. Perhitungan garis pada *loop* ditulis pada kolom sudut kiri atas (dinyatakan dengan angka) dan dengan salah satu huruf besar *I* dan *O* untuk keenam jari dari jari telunjuk sampai dengan jari manis.
Sedangkan untuk jempol dengan huruf *SML* sesuai dengan label perhitungan garis dan huruf-huruf tersebut ditulis pada kolom sudut kanan atas.
 - d. Untuk bentuk pokok lukisan *W* penentuan *I.M.O* mengikuti garis (*ridge tracing*). Dimulai dari delta kiri dan bukan tipe *lines*.

Rumus sidik jari terdiri dari:

1. *Primary*
2. *Secondary*
3. *Subsecondary*
4. *Final*
5. *Key*
6. *Major*. (Petunjuk Teknis No. Pol.: Juknis/08/III/2000 : 107-112)

Hal-hal yang perlu diperhatikan :

1. Bilamana terdapat jari yang lukisannya rusak sama sekali (buntung) maka bentuk pokok lukisannya menurut pokok lukisan jari lainnya (sesuai kolomnya).
2. Bilamana jari yang sesuai kolomnya sama-sama rusak maka bentuk pokok lukisan dinyatakan *Whorl* dengan *ridge tracing M (meeting)*.
3. Apabila ke 10 jari buntung semua, maka bentuk pokok lukisan dinyatakan *Whorl* dengan *ridge racing M (meeting)* serta final dan key tidak ada. (Petunjuk Teknis No. Pol.: Juknis/08/III/2000 : 112)

9. Pengambilan Sidik Telapak Kaki Bayi

Teknis pelaksanaannya terdiri dari :

1. Persyaratan :
 - a. Aspek Medis;
 - b. Aspek Yuridis.
2. Manfaat pengambilan sidik jari telapak kaki bayi :
 - a. Bagi Rumah Sakit
 1. *Medical Record* lebih sempurna;
 2. Menghindari pertukaran bayi.
 - b. Bagi Polri/Penyidik
 1. Mempermudah pencarian barang bukti, pemeriksaan perbandingan, keindentikan bayi dalam hal terjadi sengketa;
 2. Hasil pengambilan sidik telapak tangan kaki bayi dapat dijadikan sebagai alat bukti secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan dan secara yuridis (sah) di pengadilan. (Petunjuk Teknis No. Pol.: Juknis/08/III/2000 : 112)
3. Alat dan bahan terdiri dari :
 - a. Plat/kaca tempat membubuhkan tinta;
 - b. *Roller*;
 - c. Tinta khusus Daktiloskopi;

- d. Sepotong triplek ukuran kertas quarto 21 x 30 cm untuk alas pengambilan sidik telapak kaki bayi;
 - e. Surat keterangan kelahiran. (Petunjuk Teknis No. Pol.: Juknis/09/III/2000 : 121)
4. Petugas mengambil sidik telapak kaki bayi :
- a. Petugas Identifikasi Polri apabila diperlukan;
 - b. Dokter/bidan/perawat/dukun kelahiran yang menangani persalinan dan telah mengikuti latihan pengambilan sidik telapak kaki bayi. (Petunjuk Teknis No. Pol.: Juknis/09/III/2000 : 122)
5. Waktu Pelaksanaan
- Dilaksanakan dengan segera setelah proses persalinan, dimana bayi sudah dibersihkan sebelum bayi dipindahkan ke ruang perawatan bayi. (Petunjuk Teknis No. Pol.: Juknis/09/III/2000 : 122)

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

- 1. Terhadap bayi yang dilahirkan prematur pengambilan sidik telapak kaki bayi dilakukan setelah bayi dikeluarkan dari inkubasi.
- 2. Terhadap kasus tertukarnya bayi, formulir surat keterangan kelahiran bayi yang sudah dilengkapi dengan sidik telapak kaki bayi dapat digunakan sebagai bahan banding.
- 3. Terhadap bayi yang mempunyai kulit sensitif, pengambilan sidik telapak kaki bayi tidak dilakukan. (Petunjuk Teknis No. Pol.: Juknis/09/III/2000 : 124)

Ad 2. Data Primer

Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Tim Penyidik di Polres Cilacap yang diwakili oleh Brigadir Bambang Supriyanto, S.H.

Bekas-bekas/bukti kejahatan adalah hal yang sangat penting dalam mengungkap suatu tindak pidana, terutama untuk menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, tim penyidik dituntut berusaha dengan keras untuk menemukan bukti-bukti/bekas kejahatan tersebut, salah satunya adalah upaya penemuan sidik jari di

Tempat Kejadian Perkara. Sidik jari inilah yang pertama kali dicari oleh tim penyidik, karena sidik jari merupakan bekas/bukti yang paling efektif untuk mengungkap suatu tindak pidana dan menemukan pelakunya.

Mencari sidik jari menurut penuturan Brigadir Bambang Supriyanto, S.H., tidak bisa dilakukan dengan sembarangan, harus dilakukan oleh tim ahli yang berpengalaman. Tim tersebut bernama TIM IDENTIFIKASI yang terdiri dari 7 (tujuh) personil dan telah menjalani pelatihan dan kemampuan daktiloskopi (LATKAPUAN). Selain menjalani LATKAPUAN, juga menjalani penataran khusus sidik jari dan pendidikan kejuruan identifikasi sidik jari serta *coaching clinic* identifikasi sidik jari.

Penemuan sidik jari laten di Tempat Kejadian Perkara, memerlukan teknik-teknik tersendiri, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Dengan teknik kasat mata, dimana sidik jari tersebut bisa langsung terlihat.
2. Dengan teknik peralatan, penemuan sidik jari laten, dimana sidik jari laten merupakan sidik jari yang tidak terlihat, sehingga harus memerlukan peralatan berupa *loop* (alat pembesar);
3. Dengan menggunakan *powder* atau bedak dan serbuk magnet dengan menyesuaikan warna, baik bedak maupun magnet dengan sidik jari yang ditemukan.⁴⁹

Penerapan teknik daktiloskopi tersebut disesuaikan dengan Petunjuk Teknis (Juknis) yang dikeluarkan oleh Markas Besar Polri

⁴⁹ Wawancara dengan Brigadir Bambang Supriyanto, S.H. tanggal 19 April 2011.

tahun 2000, yaitu Petunjuk Teknis Polri di Bidang Identifikasi dengan Surat Perintah No. Pol: Sprint/17/III/Pusident tanggal 11 Maret 2000.

Brigadir Bambang Supriyanto, S.H. mengemukakan bahwa setiap kali terjadi tindak pidana di wilayah Polres Cilacap, teknik-teknik daktiloskopi selalu diterapkan. Hal ini dimaksudkan selain digunakan untuk barang bukti, juga disimpan untuk dokumen yang bersifat rahasia, karena bisa saja orang yang melakukan suatu tindak pidana tersebut suatu saat kembali melakukan tindak pidana, dan untuk melacaknya tidak akan mengalami kesulitan.

Untuk menjalankan teknik-teknik daktiloskopi petugas penyidik memerlukan alat-alat khusus, yang disebutkan oleh beliau terdiri dari :

1. Loop/kaca pembesar;
2. Senter/sinar sidik jari;
3. Kuas merabu;
4. Magnet;
5. Powder/bedak;
6. Lifter/alat pengangkat sidik jari;
7. Kamera (sidik jari), film.

Adapun langkah-langkah (prosedur) yang dilakukan penyidik dalam hal menemukan barang bukti sidik jari yaitu :

1. Tahap pengamatan;
2. Tahap pencarian sidik jari laten di TKP;
3. Tahap pengembangan sidik jari laten;
4. Tahap pengambilan sidik jari laten;
5. Tahap pemrosesan sidik jari laten;
6. Tahap pemeriksaan perbandingan sidik jari laten;
7. Tahap perumusan sidik jari;
8. Tahap penyimpanan kartu sidik jari.⁵⁰

⁵⁰ Wawancara dengan Brigadir Bambang Supriyanto, S.H. tanggal 19 April 2011.

Brigadir Bambang Supriyanto, S.H. menjelaskan bahwa prosedur yang dilakukan penyidik dalam hal menemukan barang bukti sidik jari dasarnya pada Laporan Polisi (LP) dari pengaduan masyarakat, yang kemudian diteruskan ke SATRESKRIM dan dilakukan penyidikan oleh penyidik dan penyidik pembantu. Kemudian dilakukan pemeriksaan sidik jari yang dilakukan oleh unit Identifikasi di Polres Cilacap yang ditunjuk sebagai ahli sidik jari, baru kemudian mencari sidik jari yang ada di TKP atau terkait dengan kasus yang terjadi. Brigadir Bambang Supriyanto, S.H. juga menjelaskan bagaimana cara memproses sidik jari yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara adalah dengan melakukan pemeriksaan awal apabila diketahui ada kesamaan, dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui identik atau tidaknya sidik jari yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara dibandingkan dengan sidik jari orang yang dicurigai. Kedua sidik jari tersebut dilakukan dengan pemotretan secara *close up* dengan ukuran yang sama, kemudian dilakukan pencetakan di atas kertas BW (hitam putih) dengan ukuran 20 x 30 cm, selanjutnya dicari titik-titik persamaan dan karakteristik dari garis-garis papiler pada *paten area* yang menyangkut *delta* dan *core*.

B. Pembahasan

1. Fungsi Daktiloskopi dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana

Daktiloskopi atau pengetahuan sidik jari memberikan sumbangan yang sangat besar dalam bidang kriminalistik (ilmu penyidikan kejahatan), karena dalam ilmu pembuktian perkara kejahatan, rumus sidik jari yang identik dianggap sebagai alat bukti yang sah untuk mengambil keputusan salah tidaknya tuduhan terhadap tersangka di muka pengadilan. Oleh karena itu, penyidik harus mendalami dan mempelajari teknik-teknik daktiloskopi dan langkah-langkah dalam pengambilan sidik jari sebaik mungkin.

“Brigadir Bambang Supriyanto, S.H. mengemukakan beberapa fungsi daktiloskopi, yaitu sebagai pendukung pengungkapan suatu kasus atau yang lain, bisa juga sebagai identifikasi diri dan sebagai barang bukti dalam persidangan untuk pelaku tindak pidana”.⁵¹

Sesuai dengan pernyataan Brigadir Bambang Supriyanto, S.H. bahwa sidik jari dapat digolongkan dalam alat bukti keterangan ahli. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf b KUHAP jo. Pasal 186 KUHAP. Berdasarkan pernyataan tersebut diatas, menurut Brigadir Bambang Supriyanto, S.H., KUHAP menyebut keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Adapun macam-macam alat bukti diatur dalam pasal 184 Ayat (1) KUHAP, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

⁵¹ Wawancara dengan Brigadir Bambang Supriyanto, S.H. tanggal 19 April 2011.

Keterangan ahli diletakkan pada urutan ke dua setelah alat bukti keterangan saksi. Melihat letak urutannya, pembuat undang-undang menilainya sebagai salah satu alat bukti yang penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana, namun keterangan ahli hanya diatur dalam satu pasal saja yaitu Pasal 186 KUHAP, yang berbunyi :

“Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.”

Akibatnya kalau hanya bersumber pada Pasal 186 KUHAP dan penjelasannya saja, maka sama sekali tidak memberikan pengertian apa-apa. Untuk mencari dan menemukan pengertian yang lebih luas harus dihubungkan dengan pasal-pasal lainnya yang terdapat dalam KUHAP yaitu diantaranya Pasal 1 Angka 28, Pasal 120, Pasal 133.

a. Pasal 1 Angka 28 KUHAP

Yang dimaksud dengan ahli menurut pasal ini adalah :

“Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Dari bunyi pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan :

- 1). Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan;
- 2). Maksud keterangan khusus dari ahli, agar perkara pidana yang sedang diperiksa menjadi terang dan kemudian dapat menyelesaikan pemeriksaan perkara tersebut.

Ketentuan Pasal 1 angka 28 dihubungkan dengan Pasal 184 Ayat (1) dan Pasal 186 KUHAP agar keterangan ahli dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah :

- 1). Harus merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus tentang sesuatu yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang sedang diperiksa;
- 2). Keterangan yang diberikan seorang ahli tapi tidak memiliki keahlian khusus tentang suatu keadaan yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang bersangkutan, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

b. Pasal 120 KUHAP

Pasal ini kembali menegaskan yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah orang yang memiliki keahlian khusus yang akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Dengan demikian Pasal 120 KUHAP semakin mempertegas pengertian keterangan ahli ditinjau dari segi alat bukti dan pembuktian, yakni :

- 1). Secara umum yang dimaksud dengan keterangan ahli yang dapat dianggap bernilai sebagai alat bukti yang sah ialah keterangan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang sesuatu hal;
- 2). Keterangan yang diberikan berdasarkan pengetahuannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 120 KUHAP yang dihubungkan dengan Pasal 1 Angka 28 KUHAP, maka keterangan ahli yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah ialah :

- 1). Keterangan ahli yang memiliki keahlian khusus dalam bidangnya sehubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa;
- 2). Bentuk keterangan yang diberikan sesuai dengan keahlian khusus yang dimilikinya berbentuk keterangan menurut pengetahuannya.

c. Pasal 133 KUHAP

Pasal ini lebih menitikberatkan masalahnya kepada keterangan ahli kedokteran kehakiman dan menghubungkannya dengan tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan penganiayaan dan pembunuhan.

Pasal 133 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 1 Angka 28 dan Pasal 120 KUHAP, maka Undang-Undang mengelompokkan ahli pada dua kelompok, yaitu :

- 1). Ahli secara umum, yakni orang-orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu, seperti ahli jiwa, ahli kimia, ahli pertambangan dan lain-lain;
- 2). Ahli kedokteran kehakiman seperti yang disebut dalam Pasal 133, ahli yang khusus dalam bidang kedokteran kehakiman yang berhubungan dengan bedah mayat dan forensik.

Dari penjelasan tersebut diatas dapat dipahami pengertian keterangan ahli ditinjau dari segi alat bukti dan pembuktiannya.

Mengenai nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli, pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan kata lain mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas, karena tidak mengikat seorang Hakim untuk memakainya jika bertentangan dengan

keyakinannya. Keterangan ahli dipersidangan merupakan alat bantu bagi hakim untuk menemukan kebenaran dan hakim bebas mempergunakan sebagai pendapatnya sendiri atau tidak mempergunakannya sama sekali.

Brigadir Bambang Supriyanto, S.H. selanjutnya menjelaskan, sidik jari juga dapat digolongkan dalam alat bukti surat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) Huruf c jo. Pasal 187 Huruf a KUHAP.

Menurut Brigadir Bambang Supriyanto, S.H., ketentuan mengenai alat bukti surat sama halnya dengan ketentuan alat keterangan ahli, yaitu hanya diatur dalam satu pasal saja, yakni Pasal 187 KUHAP yang berbunyi :

- Surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, ialah :
- 1). Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
 - 2). Surat yang dibuat menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
 - 3). Surat keterangan ahli dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
 - 4). Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Senada dengan apa yang dinyatakan oleh Brigadir Bambang Supriyanto, S.H. bahwa yang dimaksud dengan surat yang diatur dalam Pasal 187 huruf a KUHAP adalah :

- 1). Berita acara, misalnya Berita Acara yang dibuat oleh seorang Penyidik;
- 2). Surat yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat ketentuan tentang kejadian atau keadaan yang di dengar, dilihat atau dialami sendiri.

Mengenai nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti surat, Brigadir Bambang Supriyanto, S.H. menjelaskan :

“Semua bentuk alat bukti surat yang disebut dalam Pasal 187 KUHAP, tidak mempunyai kekuatan mengikat. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli, yaitu sama-sama mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas. Hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya, maka dari itu Hakim dapat mempergunakannya atau menyingkirkannya”.⁵²

2. **Pelaksanaan Pengambilan Sidik Jari dalam Proses Penyidikan**

Sebagaimana hasil wawancara dengan Brigadir Bambang Supriyanto, S.H., bahwa penyidikan memegang porsi yang sangat penting dalam mengungkap suatu perkara pidana. Hal ini jika mengacu pada Juklak dan Juknis pemeriksaannya tidak terbatas pada pemeriksaan perbandingan sidik jari saja. Mengingat bahwa tujuan dari penyidikan dan bahkan dari Acara Pidana itu sendiri ialah mendapatkan kebenaran materiil yaitu kebenaran yang paling mendekati kebenaran yang sebenarnya dari suatu perkara pidana.

⁵² Wawancara dengan Brigadir Bambang Supriyanto, S.H. tanggal 19 April 2011.

Guna mencapai hal tersebut maka taktik dan teknis dalam mengolah bukti-bukti fisik dan psikis mutlak diperlukan oleh penyidik. Kemampuan penyidik untuk mengolah barang bukti yang ada sehingga dapat memberikan informasi yang selengkap-lengkapnyanya tentang suatu perkara pidana menjadi sangat penting. Hal ini didahului dengan pemahaman yang memang benar dan menyeluruh dari penyidik tentang suatu cabang ilmu yang nantinya dapat berguna dalam menjelaskan bukti-bukti yang ditemukan.⁵³

Dalam penerapan teknik dan taktik daktiloskopi di Tempat Kejadian Perkara sering terhambat dengan adanya sidik jari yang kurang terang. Cara mengembangkan sidik jari yang kurang terang salah satunya dengan cara kimia yaitu : pemakaian *yodium*, pemakaian gas *iodine*, pemakaian *iodine fumer*, pemakaian *osmic acid*, pemakaian *ninhydrin spray*, pemakaian perak nitrat.

“Cara menimbulkan sidik jari yang belum nyata (*latent*) dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : 1) cara mekanis dan, 2) cara kimia”.⁵⁴

Pada proses penyidikan, ada pihak-pihak yang berhak melakukan penyidikan, dalam hal ini adalah pejabat penyidik. Dalam Pasal 1 Butir 1 KUHAP telah dijelaskan pengertian dari penyidik yang berbunyi sebagai berikut :

⁵³ Wawancara dengan Brigadir Bambang Supriyanto, S.H. tanggal 19 April 2011.

⁵⁴ R. Soesilo dan M. Karjadi, *op. cit.* hal. 43.

“Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Pengertian penyidik tersebut mengandung dua unsur, dimana telah tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP menyebutkan:

- a) Penyidik adalah :
 - (1). Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
 - (2). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- b) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Oleh karena itu penyidik mempunyai peranan yang penting dalam melakukan penyidikan, hal ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Seorang penyidik melakukan penyidikan adalah untuk menemukan alat bukti dan barang bukti, guna kepentingan penyidikan dan untuk mengungkap atau menemukan tersangka kejahatan.

Seorang penyidik mempunyai wewenang dalam melakukan penyidikan, hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) KUHAP, menyebutkan bahwa :

- a) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang;
 - (1). Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - (2). Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - (3). Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - (4). Melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan, dan penyitaan;
 - (5). Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - (6). Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - (7). Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- (8). Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - (9). Mengadakan penghentian penyidikan;
 - (10). Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf a;
 - c) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Prosedur pengambilan sidik jari yang dilakukan di Polres Cilacap memakai 8 (delapan) tahap. Hal ini dilakukan agar dalam pencarian terhadap tersangka suatu tindak pidana dapat ditemukan dengan cepat dan tepat sasaran. Delapan tahap tersebut adalah sebagai berikut :

1) Tahap Pertama Pengamatan di TKP

Pengamatan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sangat penting, karena merupakan tahap pertama yang dilakukan oleh petugas penyidik di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Tahap pengamatan ini dilakukan oleh petugas penyidik untuk mengamati bagaimana cara tersangka atau pelaku tindak pidana itu masuk atau keluar dari Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Brigadir Bambang Supriyanto, S.H. menyebutkan satu kasus tindak pidana pencurian di wilayah Polres Cilacap yang terjadi pada tanggal 18 Februari 2011 di halaman parkir Politeknik Cilacap. Kasus pencurian tersebut menimpa salah satu mobil milik pengunjung yang sedang diparkir di halaman Politeknik Cilacap. Para pelaku pencurian

berhasil mengambil uang berjumlah puluhan juta dari dalam mobil dengan cara membobol kaca samping kanan mobil tersebut. Selanjutnya Brigadir Bambang Supriyanto, S.H. menjelaskan, bahwa setelah ada laporan mengenai tindak pidana pencurian tersebut Tim Ident Satreskrim Polres Cilacap langsung mengadakan penyidikan di Tempat Kejadian Perkara (TKP).⁵⁵

2) Tahap Kedua Pencarian Sidik Jari Laten di TKP

Setelah melakukan pengamatan di TKP tahap selanjutnya adalah pencarian sidik jari di TKP. Terkait dengan tindak pidana pencurian yang telah disebutkan di atas, Tim Ident Satreskrim Polres Cilacap dalam mencari bukti-bukti tindak pidana dalam hal ini terutama sidik jari para pelaku pencurian tersebut menerapkan teknik dan taktik daktiloskopi. Pencarian sidik jari laten dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Gunakan sarung tangan atau benda lain agar pada saat pencarian atau memegang benda tidak meninggalkan sidik jari sendiri pada benda tersebut;
- 2) Melakukan pencarian setelah pemotretan di TKP selesai, dengan meneliti benda atau tempat-tempat yang kemungkinan disentuh oleh tersangka/pelaku. Pada contoh kasus pencurian di Politeknik Cilacap, obyek yang dirusak adalah mobil maka pencarian sidik jari laten dapat dilakukan pada :

⁵⁵ Wawancara dengan Brigadir Bambang Supriyanto, S.H. tanggal 19 April 2011.

- a) Pegangan pintu mobil;
- b) Tempat duduk, jendela samping, kerangka pintu dan kepala sabuk pengaman;
- c) Bagian-bagian lain pada mobil yang dicurigai pernah disentuh oleh para pelaku.

3) **Tahap ketiga pengembangan dan pengangkatan sidik jari laten.**

Setelah melakukan pencarian sidik jari laten, tahap berikutnya adalah pengembangan dan pengangkatan sidik jari laten.

1) Pengembangan sidik jari laten di TKP

Pengembangan sidik jari laten dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu :

a) Dengan cara menggunakan serbuk, terdiri dari dua macam, yaitu :

(1). Dengan menggunakan serbuk biasa :

- (a). Jangan sekali-kali menghadap arah angin pada waktu menggunakan serbuk;
- (b). Pilih serbuk yang warnanya kontras dengan permukaan benda (serbuk warna gelap dengan permukaan terang dan serbuk warna terang untuk permukaan gelap);
- (c). Lakukan percobaan terhadap semua jenis serbuk sebelum digunakan;
- (d). Tuangkan sejumlah kecil serbuk diatas sehelai kertas;
- (e). Dengan hati-hati kuas dicelupkan kedalam serbuk tersebut. Kuas ditekuk perlahan-lahan dengan jari untuk mengurangi serbuk yang berlebihan;

- (f). Serbuk pada kuas tersebut kemudian dibubuhkan dengan hati-hati pada permukaan yang dicurigai;
- (g). Bila sidik jari sudah terlihat, gerakkanlah kuas hati-hati sesuai dengan arah garis-garis papiler. Semua serbuk yang berlebihan harus dihapus dari sidik jari laten tersebut;
- (h). Potretlah sidik jari laten tersebut sebelum diangkat atau dipindahkan ke dalam *lifter*/selotip;
- (i). Sidik jari laten yang bercampur darah, debu atau yang terdapat pada permukaan mentega, permukaan yang dilapisi debu, jangan sekali-kali ditaburi atau dikembangkan dengan serbuk.

(2). Dengan cara menggunakan serbuk magnet

- (a). Pengembangan sidik jari laten tidak hanya dengan menggunakan serbuk biasa tetapi juga dengan serbuk magnet;
- (b). Serbuk yang digunakan adalah serbuk yang mengandung magnet (*magnetic powder*) dengan warna hitam, abu-abu dan putih;
- (c). Cara pengembangan serbuk magnet untuk pengembangan sidik jari laten yang terdapat pada benda-benda selain logam.

b) Pengembangan sidik jari laten secara kimia

- (1). Dengan menggunakan larutan yodium;
- (2). Dengan menggunakan larutan *ninhydrin*;

- (3). Dengan menggunakan larutan *silver nitrate*;
- (4). Dengan menggunakan larutan *gentian violet*;
- (5). Dengan menggunakan larutan *molybdenum desulfide*.

2) Pemindahan/pengangkatan dapat dilakukan dengan menggunakan:

a) Dengan *lifter* tembus pandang

- (1). Setiap sidik jari laten yang telah diberi serbuk, sebelum diangkat atau dipindahkan, dipotret terlebih dahulu;
- (2). Cara atau teknik pengangkatan yang baik hanya dapat diperoleh melalui praktek dan pengalaman, namun langkah-langkah berikut ini perlu di perhatikan dalam pengangkatan dengan transparan pengangkat tembus pandang yang berbentuk *roll*, yaitu :
- (3). Dengan sekali tarik, *lifter* transparan ditarik dari gulungannya dengan panjang secukupnya;
- (4). Letakkan bagian *lifter* transparan yang ber perekat tepat diatas sidik jari laten yang telah diberi serbuk, kemudian ditekan lurus dan kuat dengan jari;
- (5). Urutkan *lifter* transparan tepat di atas sidik jari laten dengan gerakan yang rata. Kini sidik jari laten telah berpindah ke dalam pita tersebut, urut terus pita dengan telunjuk agar sidik jari melekat dengan baik pada pita tersebut;
- (6). Tempatkan kartu alas (tempat menempelkan pita) dekat lokasi yang diinginkan;

(7). Angkat *lifter* transparan dari permukaan dengan sekali tarik, kemudian tempelkan *lifter* transparan tersebut pada kartu alas sedemikian rupa sehingga tidak terjadi gelembung udara. Sidik jari laten yang telah berpindah ke dalam pita (*lifter*) tersebut mempunyai posisi yang sama seperti ketika sidik jari laten tersebut masih dipermukaan asal.

b) Dengan *rubber lifter*/lifter karet

- (1). Pilihlah jenis *rubber lifter* tergantung dari warna serbuk yang digunakan untuk mengembangkan sidik jari laten tersebut (serbuk putih-*rubber lifter* hitam; serbuk hitam *lifter* putih);
- (2). Guntinglah *rubber lifter* tersebut sesuai ukuran yang diinginkan, kemudian penutup plastik bening dibuka;
- (3). Permukaan *rubber lifter* yang berperekat ditempelkan pada sidik jari laten yang telah diberi serbuk tersebut, ditekan rata, kemudian diurut dengan jari. Kini sidik jari laten telah berpindah ke permukaan *rubber lifter* yang berperekat tersebut;
- (4). Angkatlah *rubber lifter* tersebut dari permukaan dan penutup plastik bening tadi ditempelkan kembali pada *rubber lifter* (tempat semula). Sidik jari laten yang telah berpindah kedalam *rubber lifter* tersebut, posisinya terbalik atau berlawanan dengan posisi pada benda asal.

Agar sidik jari laten tersebut dapat mudah dilakukan suatu pengecekan dan dalam pembuktian, maka *lifter* tersebut perlu diberi label atau tanda pengenal. Pemberian label tersebut didalamnya memuat data sebagai berikut :

- a) Tanggal kejadian, peristiwa atau kasus, nomor berita acara atau laporan. (nomor kasus);
- b) TKP;
- c) Korban;
- d) Sidik jari diangkat dari atau terdapat pada;
- e) Tanggal pengembangan atau pengangkatan;
- f) Nama dan paraf petugas yang melakukan pengembangan;
- g) Sketsa yang menunjukkan lokasi atau posisi sidik jari laten.

Pengembangan sidik jari laten tidak hanya dilakukan pada jari saja tetapi juga dapat dilakukan pada kulit manusia, yang terdiri dari dua metode yaitu :

- a) Pengembangan sidik jari laten pada kulit manusia dengan metode serbuk, langkah-langkahnya adalah :
 - (1). Dengan kuas magnet dan serbuk magnet atau dengan kuas biasa dan serbuk volcanic; serbuk diaplikasikan langsung pada kulit manusia, terutama pada bagian-bagian tubuh yang biasa dipegang oleh tersangka/pelaku:
 - (a). Pergelangan tangan;
 - (b). Lengan bagian atas;

- (c). Daerah sekitar telinga;
 - (d). Daerah sekitar leher;
 - (e). Daerah sekitar buah dada atau pangkal paha (kasus seksual);
 - (f). Pergelangan kaki.
- (2). Uji coba menunjukkan sidik jari laten pada manusia hidup dapat bertahan rata-rata satu sampai satu setengah jam, pada mayat tergantung kondisi mayat;
- (3). Aplikasi pada kulit manusia harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh kesabaran.
- b) Pengembangan sidik jari laten pada kulit manusia dengan metode pemindahan perak yodium.
- (1). Dengan pipa peniup yodium, ditiupkan uap yodium ke kulit korban yang dipegang oleh tersangka/pelaku;
 - (2). Tekanlah secara perlahan dan hati-hati, plat perak langsung pada kulit manusia yang telah ditiup dengan uap yodium tersebut. Caranya: tekan salah satu tepi plat perak pada kulit dekat sidik jari laten, lalu gulingkan plat perak perlahan-lahan di atas sidik jari laten, kemudian angkat plat Perak tersebut;
 - (3). Angkat plat perak dari kulit, maka sidik jari laten akan beralih pada plat perak tersebut, seringkali dalam warna coklat;
 - (4). Arahkan plat perak tersebut ke sumber cahaya (matahari, *photoflood*, atau sinar ultra violet).

4) Tahap Keempat Pengambilan Sidik Jari Laten di TKP

1) Pengambilan Sidik Jari Laten

Langkah-langkah dalam pengambilan sidik jari laten yang baik dapat dilakukan sebagai berikut :

a) Pengisian data formulir kartu sidik, jari sebelum pengambilan sidik jari dilakukan, data perorangan dari yang akan diambil sidik jannya harus ditulis pada kartu sidik jari dan data tersebut harus dicocokkan dengan data yang tertera pada KTP yang bersangkutan. Pengisian data pada halaman satu (nama, nama kecil, pangkat/pekerjaan), dan halaman dua data (sebelah kiri dari no. 1 s/d 11 diisi oleh yang bersangkutan, tujuannya untuk bahan banding tulisan bagi Satker yang memerlukan Labfor Polri).

b) Diisi oleh petugas.

Blanko pada halaman satu (diisi oleh petugas, karena untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan saksi ahli).

2) Pengambilan sidik jari pada formulir AK-23

a) Pengambilan/perekaman sidik jari pada formulir AK-23, dilakukan dengan cara menggulingkan (*rolled impression*) dan dengan cara tekan rata (*plain impression*);

b) Pengambilan sidik jari harus benar/baik, agar kartu sidik jari dapat diolah baik secara manual maupun dengan komputer;

c) Formulir AK-23 yang baku/standar adalah formulir yang terbuat dari kertas tebal berwarna putih dengan ukuran 20 x 20 cm;

- d) Gunakanlah selalu tinta daktiloskopi. Tinta stensil hitam dapat digunakan jika tinta daktiloskopi tidak tersedia.
- e) Langkah-langkah pengambilan sidik jari adalah sebagai berikut:
- (1). Tuangkan sejumlah tetes tinta daktiloskopi di atas plat kaca.
Ratakan tinta tersebut dengan menggunakan roller yang di gerakkan maju-mundur;
 - (2). Berilah Blanko Kartu Sidik Jari (Formulir AK-23) pada orang yang hendak di ambil sidik jarinya untuk di tulis nama serta keterangan-keterangan yang diperlukan. Petugas harus mengisi data sinyalemen orang yang bersangkutan, menulis tanggal pengambilan, dan nama serta tanda tangannya sendiri di kolom-kolom yang telah tersedia;
 - (3). Tempatkan Kartu Sidik Jari tersebut pada penjepit sehingga kolom untuk jari-jari tangan kanan siap untuk dipakai;
 - (4). Pegang tangan kanan orang yang bersangkutan dan minta kepadanya untuk berdiri di sebelah kanan anda sedikit ke belakang. Periksa jari-jari tangan yang bersangkutan, jika jari-jari basah karena keringat keringkan terlebih dahulu, demikian juga jika jari-jari tersebut kotor. Jika garis-garis papilernya halus anda hanya memerlukan tekanan sedikit saja pada saat mengambil/merekam sidik jari yang bersangkutan tetapi apabila garis-garis papiler itu besar/kasar anda harus menekannya cukup kuat;

- (5). Minta orang tersebut agar bersikap santai. Dengan tangan kanan anda, peganglah ibu jari kanan orang tersebut (tangan kiri anda untuk mengontrol tekanan), gulingkan jari tersebut pada tepi plat kaca yang sudah bertinta, lalu jari tersebut digulingkan dari sisi kuku yang satu ke sisi kuku yang lainnya. Buatlah demikian juga untuk jari-jari tangan kanan yang lain, jari telunjuk dan akhirnya jari kelingking;
- (6). Gulingkan jari-jari itu satu kali pada formulir atau Kartui Sidik Jari sesuai dengan kolomnya masing-masing (1/3 ruas kedua dari ujung jari juga terekam);
- (7). Geser formulir/kartu sidik jari sedemikian rupa sehingga kolom untuk jari-jari tangan kiri siap untuk digunakan. Berilah tinta lagi pada plat kaca atau ratakan kembali tinta dengan roller jika perlu;
- (8). Mintalah orang tersebut berdiri di sebelah kanan anda, peganglah tangan kirinya dan lakukan prosedur seperti pada tangan kanan;
- (9). Geser formulir/kartu sidik jari sedemikian rupa sehingga kolom "Plain Impression" siap untuk digunakan. Ratakan tinta kembali;
- (10). Minta orang tersebut meluruskan keempat jari tangan kirinya berdampingan (telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking). Pegang jari-jari itu dan tekan rata pada tinta.

Angkat dan ulangi prosedur yang sama pada kolom yang telah tersedia pada kartu sidik jari. Lakukan prosedur seperti ini juga pada ibu jari tangan kanan yang bersangkutan;

- (11). Lakukan prosedur seperti prosedur diatas untuk keempat jari tangan kiri;
- (12). Teliti hasil pengambilan sidik jari tersebut. Jika hasilnya kurang baik (terlalu tebal atau terlalu tipis), supaya diulangi pengambilannya dengan kartu sidik jari (formulir AK-23) yang baru;
- (13). Suruhlah orang tersebut membersihkan jari-jarinya dengan alat pembersih seperti *ink cleaner* bensin, sabun atau kain lap;
- (14). Angkatlah/keluarkan kartu sidik jari itu dari penjepitnya dan catatlah jika ada jari-jari yang buntung atau rusak;
- (15). Rumuslah sidik jari tersebut dan catatlah rumus tersebut pada kartu sidik jari.

5) Tahap Kelima Pemrosesan Sidik Jari Laten

Tahap kelima ini petugas penyidik melakukan pemrosesan sidik jari yang telah diambil. Pemrosesan sidik jari laten ini adalah melakukan pencucian film atau cuci cetak film/negatif film dari hasil pemotretan terhadap sidik jari laten yang telah ditemukan atau didapatkan di Tempat Kejadian Perkara.⁵⁶

⁵⁶ Wawancara dengan Brigadir Bambang Supriyanto, S.H. tanggal 19 April 2011.

6) Tahap Keenam Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari Laten.

Tiap jari tangan, telapak tangan, jari kaki dan telapak kaki setiap orang memiliki garis-garis papilair dengan bagian-bagian kecil yang unik dan berbeda. Bagian-bagian kecil garis-garis papilair yang unik tersebut bisa disebut karakteristik garis-garis jari atau “*Galton Detail*”.

Pemeriksaan perbandingan sidik jari laten merupakan tahap keenam dalam Prosedur Pengambilan Sidik Jari (teknik daktiloskopi). Pemeriksaan perbandingan sidik jari laten dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Sebelum sidik jari laten dibandingkan dengan sidik jari tersangka atau sidik jari yang tersimpan di file atas nama orang tertentu, terlebih dahulu sidik jari laten tersebut dibandingkan dengan sidik jari orang-orang yang secara sah telah memegang sesuatu di TKP (*elimination prints*).
- 2) Menentukan asal jari.
 - a) Pada umumnya sidik jari laten berdampingan satu sama lain. Untuk lebih memudahkan pemeriksaan, perlu ditentukan terlebih dahulu dari jari/tangan manakah sidik jari laten berasal;
 - b) Beberapa hal yang dapat dijadikan pegangan dalam menentukan asal jari/tangan dari sidik jari laten :

- (1). Umumnya orang selalu memegang benda dengan tangan kanan;
- (2). Jari telunjuk, tengah, manis dan kelingking umumnya berada berdampingan sedangkan umumnya ibu jari berdiri sendiri;
- (3). Ukuran besar dan panjangnya jari serta hubungannya satu dengan yang lain berbeda-beda.

3) Menentukan persamaan/keidentikan dua sidik jari.

Untuk menentukan apakah dua sidik jari sama atau tidak, ada 4 (empat) hal atau faktor yang harus dinilai :

a) Bentuk pokok lukisan :

- (1). Harus sama antara kedua sidik jari tersebut;
- (2). Walau sama, keidentikan belum dapat ditentukan jika faktor lainnya belum atau tidak terpenuhi.

b) Karakteristik garis-garis kapiler sidik jari (*galton detail*):

- (1). Jenis dan bentuk *galton detail* pada kedua sidik jari tersebut harus sama;
- (2). Arah *galton detail* harus juga sama.

c) Jumlah titik persamaan (*galton detail* yang sama jenis, bentuk arah dan posisi) :

- (1). Duabelas atau lebih titik persamaan keidentikan pasti;
- (2). Delapan sampai dengan 11 titik persamaan, keidentikannya masih harus dikuatkan dengan hal-hal seperti : kejelasan

sidik jari, adanya *core* dan *delta* bentuk pokok lukisan yang jarang dijumpai.

d) Hubungan antara titik persamaan :

Jumlah interval garis papiler antara titik-titik persamaan di kedua sidik jari tersebut harus sama.

4) Menentukan cara/teknik pemeriksaan perbandingan sidik jari.

a) Sidik jari laten atau sidik jari yang dicurigai diletakkan berdampingan dengan sidik jari yang diketahui pada *fingerprint comparator* kemudian dengan menggunakan peralatan tersebut di atas segeralah mulai membandingkan kedua sidik jari tersebut;

b) Tentukan apakah kedua sidik jari tersebut mempunyai bentuk pokok lukisan yang sama. Bila bentuk pokok lukisan tidak utuh, perhatikan apakah aliran garis-garis papiler antara kedua sidik jari tersebut sama;

c) Bila bentuk pokok lukisan kedua sidik jari tersebut berbeda atau tidak sama, sudah pasti kedua sidik jari tersebut tidak identik, karena itu pemeriksaan lebih lanjut tidak perlu di lakukan;

d) Bila bentuk pokok lukisan atau aliran garis kapiler kedua sidik jari tersebut sama, maka pemeriksaan yang rinci harus dilakukan lebih lanjut.

7) Tahap Ketujuh Perumusan Sidik Jari

Perumusan sidik jari dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Pada waktu melakukan perumusan sidik jari langkah pertama adalah membubuhi *blocking out* yaitu membubuhkan tanda pada tiap-tiap kolom kartu sidik jari yang menunjukkan interpretasi mengenai bentuk pokok lukisan, sesuai dengan bentuk pokok lukisan yang ada;
- 2) *Blocking out*, bentuk pokok lukisan ditulis/dibubuhkan di bawah masing-masing kolom sidik jari;
- 3) Bentuk pokok lukisan ditulis/dibubuhkan di bawah masing-masing kolom sidik jari;
- 4) Perhitungan garis pada *loop* ditulis pada kolom sudut kiri atas (dinyatakan dengan angka) dan dengan salah satu huruf besar *I* dan *O* untuk keenam jari dari jari telunjuk sampai dengan jari manis. Sedangkan untuk jempol dengan huruf *SML* (*S* = *Small*, *M* = *Medium*, *L* = *Large*) sesuai dengan label perhitungan garis dan huruf-huruf tersebut ditulis pada kolom sudut kanan atas;
- 5) Untuk bentuk pokok lukisan *W* (*Whorl*) penentuan *I.M.O.* (*I* = *INNER*, *M* = *MEET*, *O* = *OUTER*) mengikuti garis (*ridge tracing*). Dimulai dari delta kiri dan bukan tipe *lines*.

8) Tahap Kedelapan Penyimpanan Kartu Sidik Jari

Sidik jari yang telah diambil kemudian dilakukan penyimpanan kartu sidik jari dan kartu-kartu pembantunya. Hal ini agar sidik jari yang telah diproses dapat disimpan sebagai barang bukti di pengadilan.

Kedelapan tahap dalam teknik daktiloskopi tersebut di atas merupakan bagian tugas penyidik dalam menemukan tersangka/pelaku tindak pidana. Pelaksanaan teknik daktiloskopi dalam penyidikan harus dilakukan secara urut dan sistematis.

Tujuan mengetahui jenis sidik jari adalah untuk mengetahui dari mana sidik jari tersebut berasal. Oleh sebab itu, setelah mengetahui jenis sidik jari yang diperiksa maka perlu dilakukan tes terhadap sidik jari korban dan sidik jari orang yang dicurigai sebagai pelaku. Dalam pengidentifikasian jenis sidik jari laten membutuhkan keahlian khusus, karena dalam pembuktian sidik jari laten tidak bisa dilihat dengan kasat mata dan harus menggunakan cara khusus.

Selanjutnya hasil tes tersebut akan dianalisis untuk memberikan petunjuk kepada penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana. Berikut ini tes yang harus dilakukan terhadap sidik jari beserta hasil analisisnya guna membantu penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana :

a. Tes terhadap sidik jari korban :

1). Hasilnya positif.

Sidik jari yang jenisnya cocok dengan korban akan memberikan petunjuk kepada penyidik siapa pelaku tindak pidana dari peristiwa tersebut jika ditemukan pada :

- a). Badan atau pakaian dari orang yang dicurigai sebagai pelaku;
- b). Alat yang digunakan dalam peristiwa tersebut yang disimpan oleh orang yang dicurigai sebagai pelaku;
- c). Benda-benda lain yang dimiliki oleh pelaku.

2). Hasilnya negatif

Jika sidik jari tidak cocok dengan sidik jari korban maka dapat diduga sidik jari tersebut milik pelaku, oleh karena itu perlu dilakukan tes sidik jari terhadap orang dicurigai sebagai pelaku.

b. Tes terhadap sidik jari orang yang dicurigai sebagai pelaku :

1). Hasilnya positif

Jika hasil test sidik jari terhadap orang yang dicurigai sebagai pelaku hasil positif (sama) maka ada kemungkinan orang tersebut memang benar pelakunya sehingga penyidikan kepada orang tersebut harus diteruskan guna mendapatkan bukti-bukti pendukung lainnya.

2). Hasilnya negatif

Jika dari hasil tes sidik jari terhadap orang yang dicurigai sebagai pelaku ternyata tidak cocok (negatif), maka penyidikan kepada orang tersebut harus dihentikan dahulu sebelum ada bukti lain yang mengindikasikan keterkaitannya dengan tindak pidana tersebut.

Dari hasil tes tersebut diatas dapat diketahui bahwa pemeriksaan sidik jari sangat membantu polisi dalam melakukan penyidikan, yaitu untuk:

- a. Memperkuat kecurigaan polisi kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku jika hasilnya positif;

- b. Menghentikan penyidikan kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku jika hasilnya negatif.

Hal tersebut diatas sejalan dengan pendapat Brigadir Bambang Supriyanto, S.H. yang mengatakan bahwa arti penting sidik jari bagi penyidik adalah untuk menguatkan kecurigaan polisi kepada seseorang atau sebagai alasan untuk menghentikan penyidikan kepada seseorang, tergantung dari hasil tes dan tempat dimana sidik jari tersebut ditemukan.⁵⁷

Dalam tingkat penyidikan, penyidik perlu dilengkapi pengetahuan serta keterampilan dalam mengungkap tersangka, salah satunya apabila di TKP ditemukan sidik jari yang diduga ada kaitannya dengan terjadinya tindak pidana. Sehingga dalam mengungkap tersangka juga tidak akan lepas dari Ilmu Daktiloskopi yang dapat memberikan keterangan yang benar dan akurat mengenai sidik jari. Hasil pemeriksaan tentang sidik jari dilakukan oleh petugas Identifikasi Daktiloskopi Negara Republik Indonesia.

⁵⁷ Wawancara dengan Brigadir Bambang Supriyanto, S.H. tanggal 19 April 2011.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa fungsi daktiloskopi dalam proses penyidikan perkara pidana sangat penting dilakukan, yaitu untuk :
 - a. Memberikan petunjuk awal bagi polisi dalam melakukan penyidikan;
 - b. Memperkuat kecurigaan polisi kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku jika hasilnya positif;
 - c. Menghentikan penyidikan kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku jika hasilnya negatif.
2. Pelaksanaan pengambilan sidik jari dalam proses penyidikan di Polres Cilacap telah disesuaikan dengan Petunjuk Teknis (Juknis) yang dikeluarkan oleh Markas Besar Polri tahun 2000, yaitu Petunjuk Teknis Polri di Bidang Identifikasi dengan Surat Perintah No. Pol: Sprint/17/III/Pusident tanggal 1 Maret 2000.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, penulis hendak memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan.

1. Hendaknya perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk menerapkan teknik dan taktik daktiloskopi, seperti laboratorium dan perlengkapan daktiloskopi guna penyidikan awal;
2. Kepolisian hendaknya mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya Tempat Kejadian Perkara (TKP), karena Tempat Kejadian Perkara (TKP) merupakan titik awal dalam mengungkap suatu perkara pidana dengan harapan untuk mengurangi resiko hilang atau rusaknya barang bukti yang berupa sidik jari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Bawengan, W. Garson. 1989. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi, Cetakan Ketiga*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Dendy Sugono dkk. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Hamzah, Andi. 1984. *Pengusutan Perkara Kriminil Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- _____. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Karjadi, M. 1976. *Sidik Jari Sistem Henry*. Bogor : Politeia.
- _____. 1981. *Tindakan dan Penyidikan Pertama di Tempat Kejadian Perkara*. Bogor : Politeia.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. 1993. *Penuntun Daktiloskopi*. Jakarta : Pusat Identifikasi Polri.
- _____. 2000. Himpunan Petunjuk Teknis tentang Pelaksanaan Proses Penyidikan Tindak Pidana. Jakarta : Polri.
- _____. 2000. *Petunjuk Teknis Polri di Bidang Identifikasi No. Pol: Sprint/17/III/2000/Pusident*. Jakarta : Pusat Identifikasi Polri.
- Nico Ngani dkk. 1984. *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan*. Yogyakarta : Liberty.
- Poernomo, Bambang. 1988. *Orientasi Hukum Acara Pidana, Edisi Revisi*. Yogyakarta : Amarta Buku.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1985. *Hukum Acara Pidana di Indonesia, Cetakan Keduabelas*. Bandung : Sumur Bandung.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1989. *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : Pradnya Paramita.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1983. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soesilo, R. 1980. *Taktik dan Penyidikan Perkara Kriminil*. Bogor : Politeia.

_____. 1989. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*. Bogor : Politeia.

Soesilo, R., M. Karjadi. 1989. *Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan)*, Cetakan Pertama. Bandung : PT Karya Nusantara.

Sutarto, Suryono. 1987. *Sari Hukum Acara Pidana I*. Semarang : Yayasan Cendekia Purna Dharma.

Tanusubroto, S. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Cetakan Pertama*. Bandung : Armico.

Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

_____. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

_____. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

_____. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

_____. Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

_____. Petunjuk Teknis No. Pol.: Juknis/01/III/2000 Tentang Pencarian Sidik Jari Laten di Tempat Kejadian Perkara.

C. Internet dan Jurnal

Anonymous. 2009. *Daktiloskopi (Ilmu Sidik Jari)*. <http://www.ittelkom.ac.id>. Diakses hari Selasa, tanggal 1 Maret 2011.

Asbaugh, David R. 1999. *Ridgeology: Modern Evaluative Friction Ridge Identification*. <http://www.onin.com/fp/ridgeology.pdf>. Diakses hari Kamis, tanggal 3 Maret 2011.

Dharmalaksana, Endra. 2008. *Pendataan Sidik Jari & Criminal Record Pelaku secara Digital*. <http://www.endradharmalaksana.com>. Diakses hari Selasa, tanggal 1 Maret 2011.

Federal Bureau of Investigation. 2000. *Processing Guide for Developing Latent Prints*. <http://www.fbi.gov/hq/lab/fsc/backissu/jan2001/lpu.pdf>. Diakses hari Kamis, tanggal 3 Maret 2011.

Hoover, John Edgar. 2006. *The Science of Fingerprints Classification and Uses*. <http://www.dermatoglyphics.com/sof/>. Diakses hari Selasa, tanggal 1 Maret 2011.

Hutagaol, Reinhard. 2008. *Sidik Jari*. <http://reinhardjambi.wordpress.com>. Diakses hari Selasa, tanggal 1 Maret 2011.

Raditiana Patmasari dkk. 2009. *Perancangan Perangkat Lunak Rumus Sidik Jari pada Bentuk Sidik Jari Jenis Whorl*. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2009 (SNATI 2009). Yogyakarta, 20 Juni 2009. Diakses hari Selasa, tanggal 1 Maret 2011.

Ross Futrell, Ivan. 2009. *Hidden Evidence: Latent Prints on Human Skin*. <http://www.crimeandclues.com/index.php/physical-evidence/fingerprint-evidence/>. Diakses hari Kamis, 3 Maret 2011.

D. Sumber Lain

Wawancara dengan Brigadir Bambang Supriyanto, S. H. selaku Tim Penyidik di Polres Cilacap.